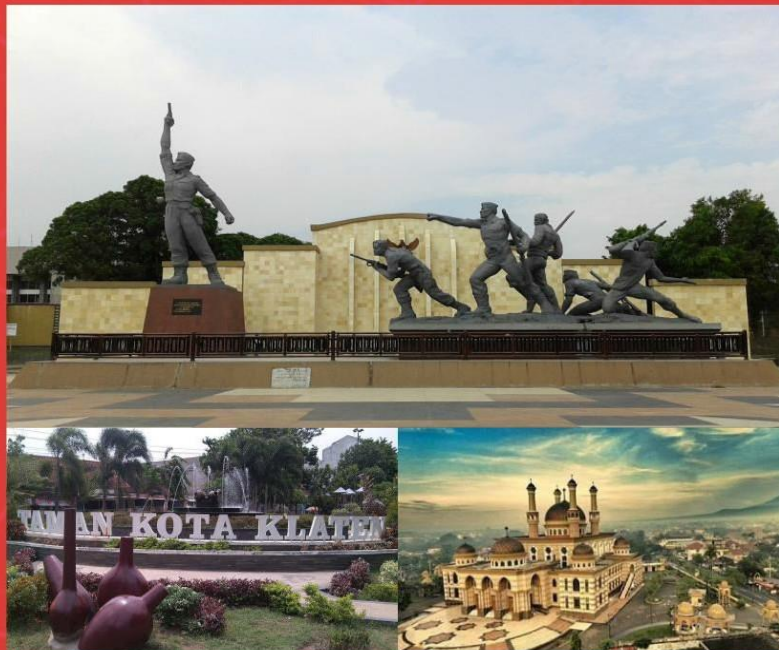




# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2017



## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

Jl. Pemuda Nomor 294  
Telp. (0272) 321046 Ps. 248. Faks. (0272) 328730  
KLATEN - 57424





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## INSPEKTORAT

Jalan Mayor Kusmanto No.23 Telp. 321040 Kode Pos 57415  
K L A T E N

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemda Kabupaten Klaten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Klaten, 27 Maret 2018

  
PIC INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN  
**Drs. PURWANTO ANGGONO CIPTO,MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691003 199603 1 008  
Asisten Ekonomi dan Pembangunan

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		iv
Daftar Grafik		vi
Daftar Gambar		vii
Daftar Diagram		viii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Tren Wilayah	I-3
	1.3 Kondisi Ekonomi Daerah	I-8
	1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten	I-11
	1.5 Isu Strategis	I-12
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>II-1</b>
	2.1 Rencana Strategis	II-1
	2.2 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017	II-20
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>III-1</b>
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-2
	3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	III-10
	3.3 Akuntabilitas Anggaran	III-85
	3.4 Efektivitas Sumber Daya	III-92
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>IV-1</b>
	4.1 Kesimpulan	IV-1
	4.2 Saran Tindak Lanjut	IV-2
Lampiran I	Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten Tahun 2017	
Lampiran II	Struktur Pemerintah Kabupaten Klaten	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten Tahun 2014-2017 .....	I-6
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016 .....	I-9
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 .....	II-13
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 .....	II-15
Tabel 2.3	Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021....	II-17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2017.....	II-20
Tabel 2.5	Target Indikator Kinerja Utama RPJMD yang Belum Dipedomani dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 pada Tahun 2017 .....	II-23
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif .....	III-2
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif .....	III-2
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2017.....	III-3
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2017 .....	III-4
Tabel 3.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Masyarakat.....	III-10
Tabel 3.6	Perkembangan Presentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.....	III-11
Tabel 3.7'	Perkembangan Presentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.....	III-12
Tabel 3.8	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017 .....	III-13
Tabel 3.9	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2013-2017.....	III-14
Tabel 3.10	Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.....	III-15
Tabel 3.11	Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017.....	III-16
Tabel 3.12	Perkembangan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017.....	III-16
Tabel 3.13	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat .....	III-18
Tabel 3.14	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya SDM yang Berkualitas dan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya .....	III-24
Tabel 3.15	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga .....	III-25
Tabel 3.16	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien.....	III-27
Tabel 3.17	Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2016-2017.....	III-31
Tabel 3.18	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya	III-37

	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel .....	
Tabel 3.19	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016 .....	III-37
Tabel 3.20	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	III-41
Tabel 3.21	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Penanaman Modal .....	III-45
Tabel 3.22	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pariwisata .....	III-49
Tabel 3.23	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan .....	III-51
Tabel 3.24	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penerapan Inovasi dalam Pengembangan Ekonomi.....	III-54
Tabel 3.25	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ....	III-56
Tabel 3.26	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman .....	III-61
Tabel 3.27	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pengendalian dan Penurunan Tingkat Kerusakan Lingkungan Hidup .....	III-64
Tabel 3.28	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana .....	III-67
Tabel 3.29	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang .....	III-69
Tabel 3.30	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban bagi Masyarakat .....	III-71
Tabel 3.31	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah.....	III-73
Tabel 3.32	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Peningkatan Kerukunan Intern dan Antar Umat Beragama .....	III-75
Tabel 3.33	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Peningkatan Perempuan dalam Pembangunan .....	III-78
Tabel 3.34	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Peningkatan Pemenuhan Hak Anak .....	III-81
Tabel 3.35	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat .....	III-83
Tabel 3.36	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 .....	III-88

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.1	Perkembangan Jumlah KK pada Tahun 2013-2017 .....	I-5
Grafik 1.2	Perkembangan Efektifitas Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 .....	I-7
Grafik 1.3	Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013-2017 .....	I-8
Grafik 1.4	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antar Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2013-2017 .....	I-8
Grafik 1.5	Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017 .....	I-12
Grafik 3.1	Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 .....	III-19
Grafik 3.2	Perkembangan Kasus Kematian Ibu Tahun 2013-2017 .....	III-20
Grafik 3.3	Perkembangan Persentase Angka Kematian Bayi Tahun 2013-2017 .....	III-21

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan .....	I-4
Gambar 2.1	Korelasi Antara Sasaran dan Misi Pembangunan Daerah .....	II-18



## **DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 1.1	Komposisi Nilai PDRB Atas Harga Berlaku Tahun 2010 pada Tahun 2016 dari Masing-Masing Sektor Menurut Lapangan Usaha	I-11
Diagram 3.1	Peringkat Kinerja Progresif .....	III-8
Diagram 3.2	Peringkat Kinerja Represif .....	III-9
Diagram 3.3	Kesesuaian Antara Program RKPD dengan APBD Tahun 2017 .....	III-28
Diagram 3.4	Kesesuaian Antara Kegiatan RKPD dengan APBD Tahun 2017 .....	III-28



## 1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Disamping itu, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif, serta memiliki pendapatan per kapita untuk hidup layak (*Human Development Report, 1990*).

**BAB I PENDAHULUAN**, terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Pembangunan  
Menyeluruh dan Tren Wilayah
- 1.3 Kondisi Ekonomi Daerah
- 1.4 Kapabilitas SDM  
Pemerintah Kabupaten Klaten
- 1.5 Isu Strategis

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka harus disusun *grand-design* perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional harus dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

perlu penguatan pelaksanaan otonomi daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang disampaikan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2017 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan dari setiap instansi pemerintah.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Pemerintah Kabupaten Klaten menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

---

## **1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Tren Wilayah**

### 1.2.1 Kondisi Geografi dan Demografi

#### a. Letak Geografis

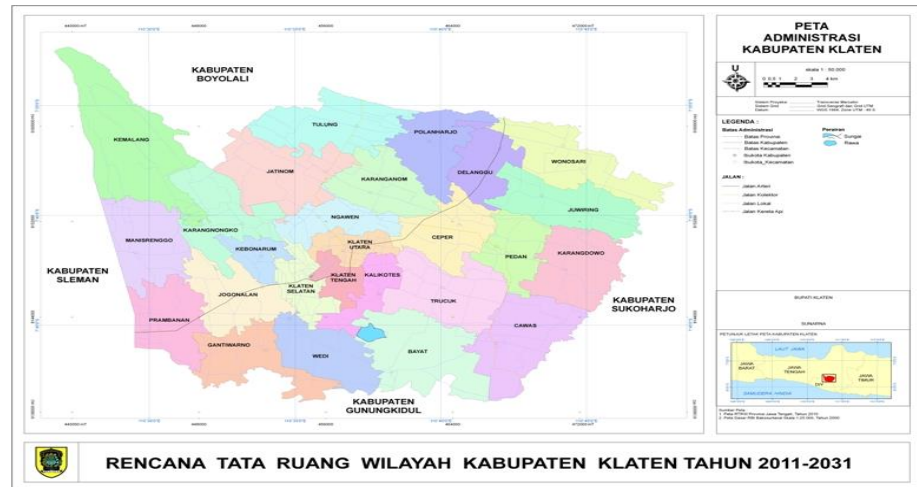
Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7<sup>o</sup>32`19” Lintang Selatan sampai 7<sup>o</sup>48`33” Lintang Selatan dan antara 110<sup>o</sup>26`14” Bujur Timur sampai 110<sup>o</sup>47`51” Bujur Timur.

#### b. Tata Letak dan Wilayah Administrasi

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha (655,56 km<sup>2</sup>) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, 3.689 RW dan 9.592 RT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul ( DIY); dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).

Gambaran Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan

c. Penggunaan Lahan

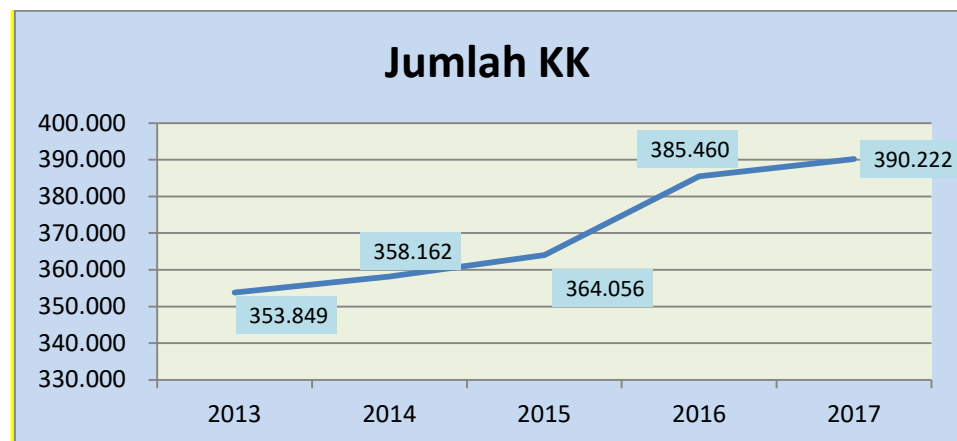
Dari sisi penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2013-2017 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah dari 33.314 Ha pada tahun 2013, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2014, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2015, pada tahun 2016 menjadi 33.111 Ha, dan pada tahun 2017 menjadi 33.066 Ha.

Besaran luas lahan dan persentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan Kabupaten Klaten sebagai kawasan agropolitan, perlu adanya pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai produk unggulan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah.

d. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 1.304.519 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 650.928 jiwa, dan perempuan sebanyak 653.591 jiwa. Kepadatan penduduk 1.990 jiwa/km<sup>2</sup>.

Di samping itu, adanya pertambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan terjadinya pertambahan jumlah Kepala Keluarga (KK). Gambaran perkembangan jumlah KK (Kepala Keluarga) pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Grafik 1.1.



Grafik 1.1. Perkembangan Jumlah KK pada Tahun 2013-2017  
Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2017.

Jumlah keluarga sebanyak 390.222 KK sebagaimana tersebut pada Grafik 1.1. terdiri dari keluarga yang dikategorikan Pra Sejahtera sebanyak 67.400 KK, Sejahtera I sebanyak 83.239 KK, dan Keluarga Sejahtera sebanyak 239.583 KK.

1.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Berbagai program pembangunan khususnya dalam pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia, yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Angka Harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per kapita. Adapun Hasil penghitungan IPM Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
 di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2017**

Indikator IPM	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Angka harapan Hidup (tahun)	76,47	76,52	76,54	76,55
Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,43	7,74	7,92	8,16
Angka harapan lama sekolah (tahun)	12,12	12,27	12,74	12,84
Pengeluaran Riel Per kapita (dalam Ribuan Rp.)	10.858	10.962	10.965	11.178
IPM	71,71	72,42	73,19	73,81

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2017

### 1.2.3 Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten dapat disajikan dengan 2 (dua) pendekatan pendataan, yaitu: persentase penduduk miskin dan jumlah rumah tangga miskin yang masing-masing dihitung dengan kriteria yang berbeda.

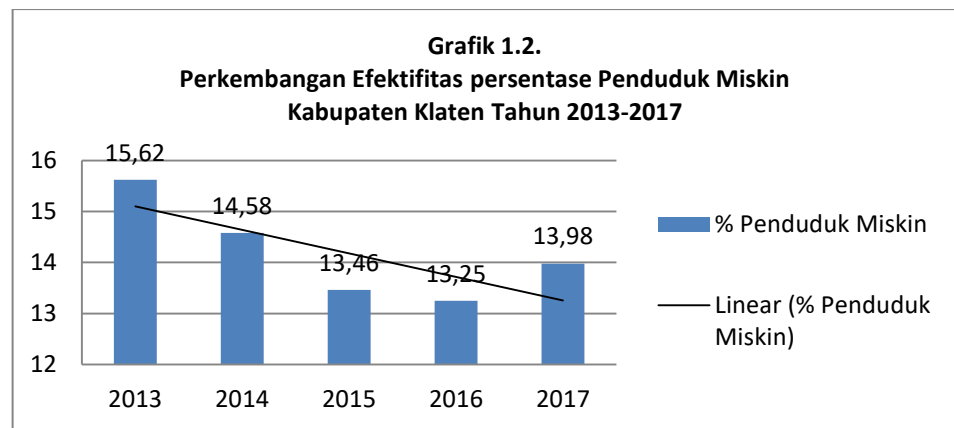
#### a. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan pada hasil survey Susenas, dimana angka yang diperoleh adalah angka makro. Adapun penentuan penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan

pemenuhan kebutuhan pangan maupun non pangan. Garis kemiskinan setara dengan 2.100 kkal per kapita.

Dilihat dari perkembangannya, persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten terus mengalami penurunan (kinerja positif), dari sebesar 15,62 % pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebesar 13,98% pada tahun 2017 atau turun sebesar 1,64% selama 5 (lima) tahun terakhir.

Untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Grafik 1.2.



*Grafik 1.2 Perkembangan Efektifitas Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017*

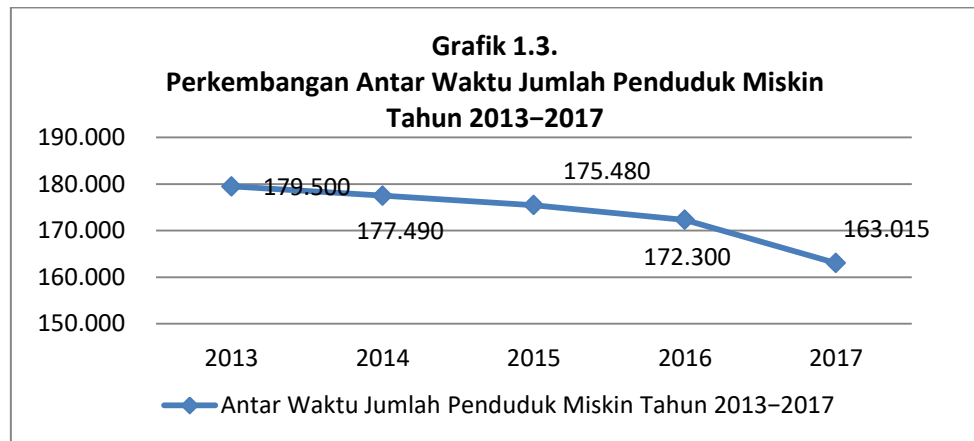
*Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten 2018, (diolah).*

Pada Grafik 1.2. ditunjukkan perkembangan efektivitas persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten selama lima tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 1,64% selama 5 (lima) tahun terakhir

b. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Dalam rentang waktu 2013-2017, dari sebanyak 179.500 jiwa pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebanyak 163.015 jiwa pada tahun 2017 atau turun sebanyak 13.485 jiwa. Pada Grafik 1.3. ditunjukkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten terus mengalami penurunan (kinerja positif).

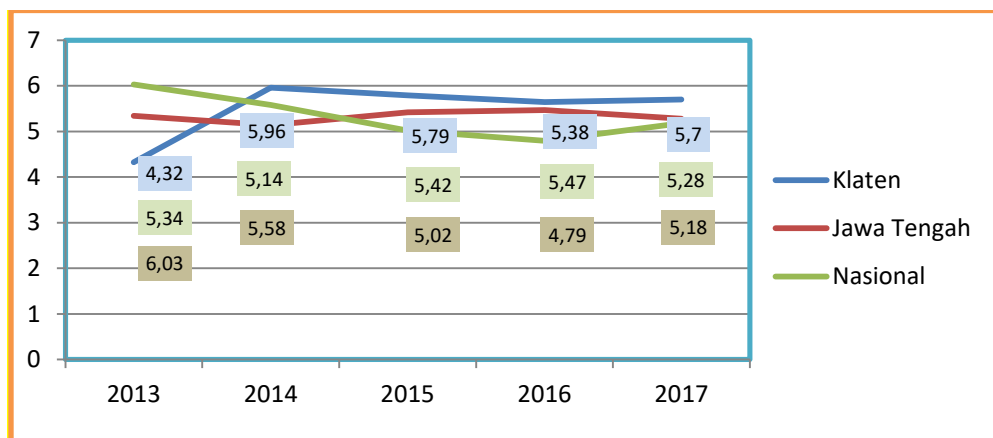




Catatan : Tahun 2017 angka sementara

### 1.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2017 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2013 tumbuh 4,32%, dan tahun 2014 tumbuh menjadi sebesar 5,96%, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan (atau hanya tumbuh 5,79%) sebagai akibat pengaruh perekonomian nasional, sedangkan tahun 2016 tumbuh sebesar 5,64 %, dan tahun 2017 diperkirakan tumbuh berkisar sebesar 5,7%. Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2013-2017, dapat dilihat pada Grafik 1.4.



Grafik 1.4. Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2013-2017  
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2013-2016 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, di Kabupaten Klaten selama Tahun 2013-2016 dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.2.  
**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010  
 di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016 (dalam Rp.Juta)**

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016	
		Nilai (juta Rp.)	Pertum- buan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertum- buan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertum- buan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumb- uhan %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.095.353,37	13,26	3.296.332,51	12,54	3.636.846,55	12,49	3.977.360,59	12,45
2	Pertambangan dan Penggalian	662.226,32	2,84	809.207,55	3,08	955.364,63	3,28	1.101.521,71	3,45
3	Industri Pengolahan	7.693.350,45	32,95	9.116.653,82	34,68	10.267.086,06	35,26	11.417.518,30	35,74
4	Pengadaan Listrik dan gas	34.673,28	0,15	35.924,44	0,14	36.412,77	0,13	36.901,10	0,12
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.394,65	0,05	12.097,70	0,05	12.698,33	0,04	13.298,96	0,04
6	Konstruksi	1.417.692,47	6,07	1.604.879,56	6,11	1.780.130,61	6,11	1.955.381,66	6,12
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.362.830,00	18,69	4.611.007,29	17,54	4.977.826,91	17,1	5.344.646,53	16,73
8	Transportasi dan Pergudangan	483.145,12	2,07	557.513,38	2,12	612.931,95	2,11	668.350,52	2,09
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	803.221,78	3,44	878.161,00	3,34	974.845,99	3,35	1.071.530,98	3,35
10	Informasi dan Komunikasi	795.566,85	3,41	836.098,10	3,18	880.528,28	3,02	924.958,46	2,89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	801.037,09	3,43	889.154,30	3,38	985.953,41	3,39	1.082.752,52	3,39
12	Real Estate	298.881,50	1,28	343.172,57	1,31	381.078,74	1,31	418.984,91	1,31

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016	
		Nilai (juta Rp.)	Pertum- buhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertum- buhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertum- buhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumb- uhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Jasa Perusahaan	71.050,05	0,3	79.657,41	0,3	90.459,78	0,31	101.262,15	0,32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	626.029,07	2,68	668.437,00	2,54	730.951,96	2,51	793.466,92	2,48
15	Jasa Pendidikan	1.548.658,63	6,63	1.805.978,48	6,87	1.984.205,50	6,81	2.162.432,52	6,77
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	262.302,13	1,12	303.146,41	1,15	339.329,96	1,17	375.513,51	1,18
17	Jasa Lainnya	377.737,09	1,62	436.804,15	1,66	470.679,24	1,62	504.554,33	1,58
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>20.299.990,96</b>	<b>6,27</b>	<b>21.392.250,75</b>	<b>5,38</b>	<b>22.551.296,84</b>	<b>5,42</b>	<b>31.558.691,06</b>	<b>8,87</b>

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2017 (diolah)

Dari Tabel 1.4. dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2016 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.19.102.405,71 juta pada tahun 2013, meningkat menjadi sebesar Rp.31.950.435,67 pada tahun 2016. Adapun komposisi Nilai PDRB Atas Harga Berlaku Tahun 2010 pada tahun 2016 dari masing-masing sektor menurut lapangan usaha sebagaimana Diagram 1.1.

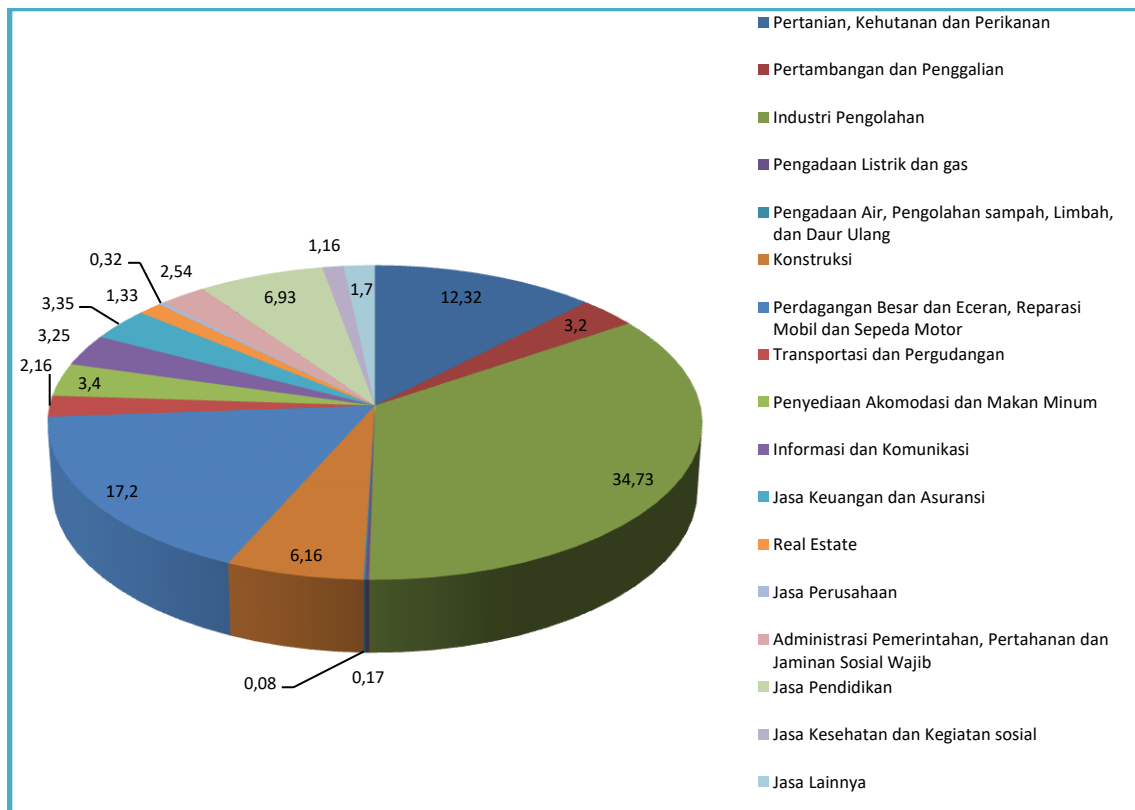
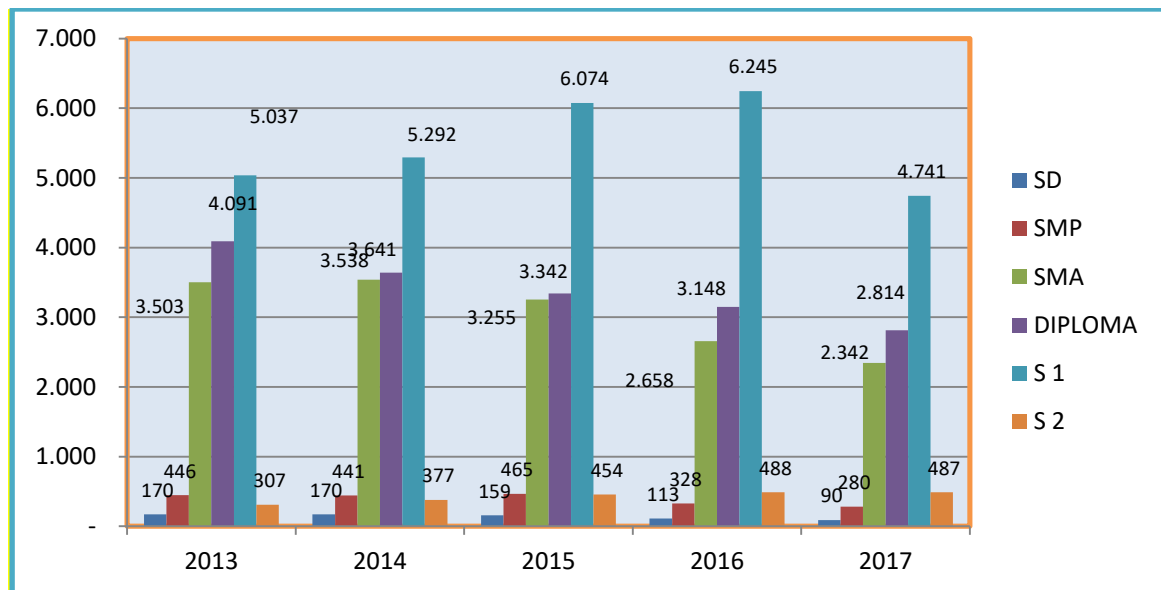


Diagram 1.1 Komposisi Nilai PDRB Atas Harga Berlaku Tahun 2010 pada tahun 2016 dari masing-masing sektor menurut lapangan usaha

#### 1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten

Berdasarkan data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Klaten, pada tahun 2017 jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten telah mencapai sebanyak 10.754 orang, yang terdiri dari 4.666 orang (atau 43,39 %) Laki-laki, dan 6.088 orang (atau 56,61 %) perempuan. Gambaran singkat profil jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, dan dapat disajikan dalam Grafik 1.5.



Grafik 1.5. Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

## 1.5 Isu Strategis

Isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten, diantaranya :

### 1. Pendidikan Untuk Semua dan Peningkatan Moralitas

Isu belum optimalnya penanaman nilai-nilai moralitas, budi pekerti dan integritas diibaratkan bahwa pendidikan memiliki dua mata pisau, di satu sisi berorientasi pada kecerdasan dan iptek guna kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan jasmaniah, di sisi lain berorientasi pada kecerdasan emosional dan spiritual guna kedamaian hidup, solidaritas dan kepedulian sosial.

Penunjang sisi yang pertama adalah adanya kesempatan dalam memperoleh pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kesempatan yang sama tersebut berlaku baik laki-laki-perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin, yang artinya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Menuju pendidikan

Wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Klaten, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan gedung dan prasarana lainnya, merupakan contoh riil perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Agar pendidikan bisa bermanfaat, kurikulum pendidikan juga harus mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha dan spesifikasi potensi setiap peserta didik.

Penunjang sisi yang kedua adalah pembentukan karakter manusia yang berbudi, agar mampu memilih yang baik, menghindari/mencegah perilaku yang salah. Sehingga perlunya pendidikan untuk semua, dan peningkatan moralitas menjadi upaya sinergis untuk menciptakan Kabupaten yang maju, mandiri dan berdaya saing.

## **2. Pelayanan Kesehatan**

Percepatan *Sustainable Development Goals (SDG's)* dan pencapaian target indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan belum tercapai. Angka kematian bayi dan balita, status gizi masyarakat, endemi Demam Berdarah, Flu Burung dan Chikungunya, angka kesakitan dan kematian diabetes militus, kardiovaskuler dan keganasan (kanker), kebiasaan merokok serta pola hidup tidak sehat lainnya menjadi sebagian dari masalah yang harus ditangani.

Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, jaminan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi semua warga negara. Subsidi silang pun harus disadari oleh semua pengguna layanan kesehatan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya pada pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat/swasta sesuai dengan kemampuannya.

## **3. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Isu reformasi birokrasi selama ini belum menyentuh akar permasalahan peningkatan pelayanan publik, dalam hal memperbaiki tata pemerintahan yang mencakup seluruh aspek

manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban) dengan pengertian:

- a. Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan, terukur, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk secara ramping namun mampu mencakup keseluruhan urusan/kepentingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas, tidak tumpang tindih dan memungkinkan kemudahan akses pelayanan terhadap publik.
- c. Penanganan berbagai permasalahan pemerintahan dan pembangunan (Penegakan Peraturan Daerah, dan Pencegahan Korupsi) yang sangat kompleks membutuhkan penempatan aparatur yang sesuai baik secara kualitas kompetensi maupun kuantitasnya. Pembinaan terhadap aparatur mesti terus dilakukan agar mampu menyikapi dinamika yang terjadi, responsif dengan dedikasi dan integritas yang tinggi untuk semata-mata kepentingan umum. Selain itu, pembangunan juga membutuhkan aparatur dengan daya inisiasi dan inovasi yang baik untuk dapat mengejar ketertinggalan dan mengatasi keterpurukan atas kemiskinan dan instabilitas yang terjadi.
- d. Kelemahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaporan dan pertanggungjawaban biasanya terletak dalam kemampuan penyediaan data, analisa dan model laporan yang tidak simpel. Kesadaran akan pentingnya data yang lengkap dan akurat hingga kearsipan sebagai dokumen pembuktian harus ditingkatkan.

#### **4. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Isu keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai pembangunan daerah selalu terkait dengan

pelaksanaan Otonomi Daerah bahwa Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Sekalipun langkah dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah telah diupayakan melalui intensifikasi pemungutan pajak/retribusi, penggalan potensi pendapatan dan perwujudan realisasi investasi, dan efisiensi dan efektivitas belanja daerah tetap saja keterbatasan anggaran menjadi masalah klasik. Anggaran berbasis kinerja, dan anggaran berbasis beban kerja belum bisa menjawab kebutuhan pembangunan, manakala penapisan permasalahan belum terurai terlebih dahulu.

## **5. Kemiskinan dan Pengangguran**

Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten yang masih rendah di banding dengan rerata Jawa Tengah, sementara tingkat inflasi yang masih relatif tinggi sangat memungkinkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan beban berat bagi masyarakat miskin. Langkah preventif dalam bentuk pemberdayaan dan langkah kuratif dalam bentuk jaminan sosial atas kebutuhan dasar mesti dilakukan. Penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada saat ini (tahun 2017) sebanyak 163.015 jiwa (13,98%). Dan sisi lain, masih terjadinya kesenjangan antar wilayah kecamatan yang memerlukan perhatian semua pihak.

Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain disebabkan oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam, juga disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Disamping itu, lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah terciptanya pangsa pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan iptek dalam



produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian.

## **6. Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, dan Bencana Alam**

Menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan penambangan bahan galian Golongan C, dan menurunnya daya dukung lingkungan, kelestarian fungsi adalah sebagai akibat kurangnya pengendalian para pemangku kepentingan dalam pemanfaatan, dan penataan struktur ruang. Kesalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak layak huni, lingkungan permukiman kumuh utamanya pada kawasan padat, penghijauan dan resapan air ke tanah serta penertiban perizinan perlu makin diperhatikan.

Dampak dari kesalahan tersebut akan meningkatnya potensi kerusakan lingkungan dan bencana non alam, bencana alam dan bencana sosial, menuntut kesiap-siagaan penanganan bencana dan dukungan sarana prasarana makin dibutuhkan. Terutama perlunya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung, merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan.

## **7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan**

Isu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang merebak akhir-akhir ini menyebabkan perlunya perlindungan anak dan perempuan, apalagi untuk mewujudkan Kabupaten Klaten LAYAK ANAK menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut dilatarbelakangi masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak, lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, serta sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

## **8. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Isu tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini masih adanya masyarakat belum sejahtera, padahal azas dasar tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik.

Sehingga berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dan harus dilaksanakan dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan (SPM, SKM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

## **9. Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan**

Isu lahan pangan berkelanjutan mencuat, karena penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berkurang seiring dengan penambahan jumlah penduduk, aktifitas penduduk dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan dari tanah pertanian berubah ke non pertanian, mengingat Kabupaten Klaten dinyatakan sebagai daerah penyangga pangan, maka perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan kebutuhan untuk mempertahankan posisi sawah lestari menjadi mendesak. Adapun sawah lestari ditetapkan seluas 32.451 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten.

## **10. Penanganan Infrastruktur**

Meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah, menyebabkan semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur

sebagai sarana publik. Dalam hal ini, tidak terbatas pada infrastruktur fisik namun juga terintegrasi dengan infrastruktur non fisik dan teknologi informasi, sehingga ke depan partisipasi, transparansi dan ketepatan manfaat akan menjadi lebih baik. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor yang sinergis dengan rencana tata ruang.

Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Kabupaten Klaten dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah, berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi, dan mobilisasi sumberdaya. Selain itu, pengembangan dan pembenahan sarana transportasi publik juga menjadi hal penting guna mengurangi beban arus distribusi dan akan berefek domino pada koneksitas antar wilayah yang semakin kuat.

Pembangunan infrastruktur sumberdaya air diarahkan untuk mewujudkan air sebagai *collective goods*. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk kepentingan produksi dan konsumsi secara efektif dilakukan melalui perlindungan terhadap kawasan resapan air di daerah hulu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber-sumber air tersebut. Selain itu, pembangunan jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi hal penting untuk tetap dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Klaten.

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hal penting dan menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur secara utuh dan berkelanjutan. Namun demikian, pertumbuhan dan kegiatan sosial ekonomi juga perlu mempertimbangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat menjamin

keutuhan lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan akan datang. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Analisis permasalahan pembangunan diharapkan akan dapat menjelaskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2021.

#### 1. 2.1.1 Visi dan Misi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal

1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah: *“Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur”*.

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa

BAB II PERENCANAAN KINERJA, berisi :  
*2.1 Rencana Strategis*  
*2.2 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017*  
*2.3 Pentahapan dan Program Prioritas Tahun 2017*

Tengah Tahun 2005-2025, dengan Visi: “Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya”.

Dasar Filosofi Misi RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021, yakni:

*Pertama* : **Redi – tinamping**, artinya seorang pemimpin harus bisa aju-ajer dengan masyarakat.

*Kedua* : **Jiwan – danarta**, artinya seorang pemimpin harus mampu membaca tanda-tanda zaman. Rumusan RPJM yang kita susun, tak lebih sebagai aktualisasi diri membaca tanda-tanda zaman.

*Ketiga* : **Lir – ginelar**, artinya dalam mengambil keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Itulah mengapa perlunya Musrenbangda RPJM.

*Keempat* : **Pitraya – inyika**, artinya jiwa pengabdian seorang pemimpin harus dilandasi adanya semangat untuk melayani. Itulah makanya semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten diwajibkan fokus pada urusan pelayanan dasar.

*Kelima* : **Andaya – wilang**, artinya seorang pemimpin jangan mengumbar janji, dan memelihara rasa “ewuh pakewuh” tetaplah fokus pada tujuan semula, dalam bahasa Permendagri: aspek kesejahteraan, pelayanan publik, dan daya saing daerah harus tetap sebagai arah kebijakan pembangunan daerah.

*Keenam* : **Surya – sribhawanti**, artinya kehadiran negara harus menjadi pelindung peradapan.

*Ketujuh* : **Rohartaya**, artinya selalu harus insaf dan tawakal.

*Kedelapan* : **Traju – tresna**, artinya arif dan bijaksana

14

Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang dimiliki, serta untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah:

## **MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING**

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan

untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. **Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik *kebutuhan lahiriah* yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun *kebutuhan batiniah* yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. **Berdaya saing**, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

### **Misi**

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah sebagai implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;
- Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- Misi 3 : Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
- Misi 4 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
- Misi 5 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
- Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
- Misi 7 : Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
- Misi 8 : Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

## **2. 2.1.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Sehingga adanya rumusan



sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 memiliki tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut:

---

### **Misi 1**

#### **Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya**

Misi ini didukung dengan 3 (tiga) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Mewujudkan pemenuhan pendidikan bagi masyarakat.

Sasaran : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat.

Arah kebijakan : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju wajar dikdas 12 tahun, Meningkatkan budaya baca masyarakat, Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan baik bagi pendidikan formal maupun non formal, dan Meningkatkan etos kerja pendidik dan tenaga kependidikan.

Tujuan 2 : Mewujudkan kualitas derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat.

Arah kebijakan : Meningkatkan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan, dan Meningkatkan akses pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan 3 : Mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya.

Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya.

Arah kebijakan : Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur berdasar pada kearifan lokal.

---

---

## **Misi 2**

### **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah.

Arah kebijakan : Mewujudkan regulasi dan deregulasi yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih, Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur.

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan pemerintahan desa.

Arah kebijakan : Meningkatkan kemampuan anggota DPRD yang didukung peningkatan fasilitas kinerja, Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.

Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Sasaran : Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Arah kebijakan : Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah, Meningkatkan dan mengembangkan pendapatan daerah, serta meningkatkan dan mengembangkan aset daerah.

---

---

### **Misi 3**

#### **Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;**

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Arah kebijakan : Meningkatkan kapasitas dan tata kelola ekonomi daerah berbasis agropolitan, Meningkatkan dan mengembangkan produktifitas modal daerah, Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan, serta Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan petani.

Sasaran 2 : Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor Indagkop, UMKM dan PM.

Arah kebijakan : Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal, Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, Pengembangan pusat promosi dan perdagangan, serta Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat.

Sasaran 3 : Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan.

Arah kebijakan : Meningkatkan dan mengembangkan destinasi dan promosi kepariwisataan, serta Meningkatkan dan mengembangkan industri kreatif dan kepariwisataan.

Sasaran 4 : Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan.

Arah kebijakan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, serta Meningkatkan dan mengembangkan terciptanya lapangan usaha dan kesempatan kerja.

---

---

#### **Misi 4**

#### **Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;**

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan : Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat.

Sasaran 1 : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum

Arah kebijakan : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton), jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah, Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran), Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum jalan (hotmix dan rigid/beton), jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah, Meningkatkan kualitas bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran), Meningkatkan pengelolaan persampahan, serta Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi.

Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana, utilitas kawasan perumahan dan permukiman

Arah kebijakan : Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat, Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana, utilitas umum jalan, dan makam, Meningkatkan ketersediaan kebutuhan energi listrik perdesaan, Meningkatkan

layanan jaringan listrik rumah tangga di perdesaan dan pengembangan desa mandiri energi, Pengembangan sumber daya energi terbarukan, serta Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan dan ruang publik.

---

### **Misi 5**

#### **Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;**

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran : Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup.

Arah kebijakan : Pengembangan pengelolaan dan konservasi sumber daya air dan daerah aliran sungai, Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan, serta Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat berbasis agro forestry.

Tujuan 2 : Mewujudkan pengurangan resiko bencana.

Sasaran 1 : Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana.

Arah kebijakan : Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana, Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana, serta Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana.

Sasaran 2 : Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Arah kebijakan : Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasarkan pada upaya pembangunan berkelanjutan, Meningkatkan dan pengembangan pemanfaatan prasarana,

sarana dan utilitas umum berbasis mitigasi bencana, serta Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian kelaikan kondisi fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum berbasis bencana.

---

### **Misi 6**

#### **Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;**

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian Pancasila.

Sasaran 1 : Terwujudnya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.

Arah kebijakan : Meningkatkan wawasan kepribadian berjiwa Pancasila, Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan, Meningkatkan moralitas, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta Meningkatkan perlindungan sosial.

Sasaran 2 : Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah (Perda).

Arah kebijakan : Meningkatkan pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai, Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat, serta Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

Sasaran 3 : Terwujudnya akhlak yang mulia.

Arah kebijakan : Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana peribadatan, serta Meningkatkan dan mengembangkan norma-norma dan pendidikan sosial keagamaan.

Sasaran 4 : Terwujudnya keharmonisan kehidupan beragama.

Arah kebijakan : Meningkatkan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama.

---

---

### **Misi 7**

#### **Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;**

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

Sasaran : Meningkatnya kapasitas perempuan dalam pembangunan

Arah kebijakan : Meningkatkan peran serta perempuan dan kesetaraan gender, Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, Meningkatkan dan pemberdayaan perempuan, Meningkatkan dan pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan perempuan, serta Meningkatkan dan penguatan keluarga harapan berbasis usaha ekonomi produktif.

Tujuan 2 : Mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Sasaran : Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak

Arah kebijakan : Mendorong dan memastikan anak mendapatkan: 1) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; 2) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; 3) Pemenuhan hak Sipil dan Kebebasan; 4) Perlindungan khusus; serta 5) Peningkatan dan penguatan kelembagaan anak, serta Mendorong dan menguatkan kondisi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

---

## **Misi 8**

### **Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik**

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan : Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas.

Sasaran 1 : Terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Arah kebijakan : Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perijinan, administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan, serta Meningkatkan cakupan dan kualitas standar pelayanan minimal sosial dasar (bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial).

Sasaran 2 : Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat.

Arah kebijakan : Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bupati.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan IKU (Indikator Kinerja Utama) Kabupaten Klaten sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan, dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) dari berbagai program prioritas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Perumusan IKU Kabupaten Klaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran



keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1.  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama  
 Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	1.1	Angka Partisipasi Kasar PAUD
		1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
		1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
		1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
		1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
		1.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
		1.7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
		1.8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
		1.9	Angka kelulusan SD/MI
		1.10	Angka kelulusan SMP/ MTs
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	2.1	Persentase balita gizi buruk
		2.2	Angka kematian ibu melahirkan
		2.3	Angka kematian bayi
		2.4	Angka kematian balita
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	3.1	Persentase konsistensi perencanaan
		3.2	Persentase penggunaan data statistik
		3.3	Skor LPPD
		3.4	Indeks profesionalitas ASN
		3.5	Skor LKjIP
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	4.1	Opini BPK terhadap LKPD
		4.2	Tingkat Muturitas SPIP
		4.3	Tingkat Kapabilitas APIP
5	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan	5.1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
		5.2	Indeks Kecukupan Pangan
		5.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
6	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM	6.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
		6.2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
		6.3	Persentase UMKM yang memiliki daya saing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
	dan penanaman modal	6.4	Persentase kenaikan koperasi aktif
		6.5	Persentase kenaikan nilai investasi (%)
			PMDN PMA
7	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan	7.1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan
		7.2	Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani
8	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pengembangan ekonomi	8.1	Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan
9	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	9.1	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)
		9.2	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)
		9.3	Persentase irigasi dalam kondisi baik (%)
10	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan pemukiman	10.1	Persentase air minum layak
		10.2	Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak
		10.3	rasio luasan kawasan kumuh perkotaan
		10.4	Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan
		10.5	Persentase penanganan RTLH
11	Terwujudnya pengukuran kerentanan resiko bencana	11.1	Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa)
12	Terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian ruang	12.1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
13	Meningkatnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat	13.1	Angka kriminalitas
		13.2	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial
14	Peningkatan pemenuhan hak anak	14.1	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	15.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
		15.2	Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk

Sumber: Perbup Nomor 34 Tahun 2016

Disamping Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana disebut di atas, masih ada Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Klaten Tahun 2016-2021 diantaranya Sasaran Strategis Indikator Kinerja sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja  
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	1.1	Persentase kenaikan kunjungan perpustakaan
2	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya	2.1	Persentase kenaikan peserta festival seni dan budaya
		2.2	Persentase kenaikan kunjungan taman budaya
3	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	3.1	Tingkat prestasi pemuda
		3.2	Tingkat prestasi olahraga
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	4.1	Persentase pengelolaan arsip secara baku
		4.2	Persentase sistem berbasis informasi
		4.3	Persentase pengamanan informasi persandian
		4.4	Opini Kemenkeu terhadap kapasitas fiskal daerah
5	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan	5.1	Tingkat konsumsi ikan
		5.2	Persentase kerusakan hutan dan lahan kritis
6	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan	6.1	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan
7	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	7.1	Persentase jembatan dalam kondisi baik
		7.2	Rasio tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk
		7.3	Persentase pengoperasian TPA (%)
		7.4	Tingkat keselamatan lalu lintas
8	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan pemukiman	8.1	Rasio cakupan elektrifikasi
9	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah	9.1	Persentase penegakan peraturan daerah
		9.2	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
10	Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama	10.1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
		10.2	Persentase peningkatan penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama
11	Peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan	11.1	Rasio perempuan korban kekerasan
		11.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
		11.3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
		11.4	Drop out akseptor KB
		11.5	Laju pertumbuhan penduduk
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	12.1	Persentase alih fungsi lahan tanah pertanian menjadi non pertanian
		12.2	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

Sumber: RPJMD Kabupaten Klaten 2016 - 2021

### 2.1.3 Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi bupati terpilih pada periode Tahun 2016-2021 yakni ***Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing*** dengan menetapkan 8 (delapan) butir misi sebagai penjabaran atas visi dalam rangka perwujudan *ultimate goal*. Maka agar *ultimate goal* ini jelas sarannya, dan dapat diimplementasikan perlu disusun pentahapan pembangunan daerah sebagai *milestone* (sasaran antara) dalam mewujudkan visi.

Adapun pentahapan pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dibagi menjadi 4 (empat) tahap pembangunan, sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

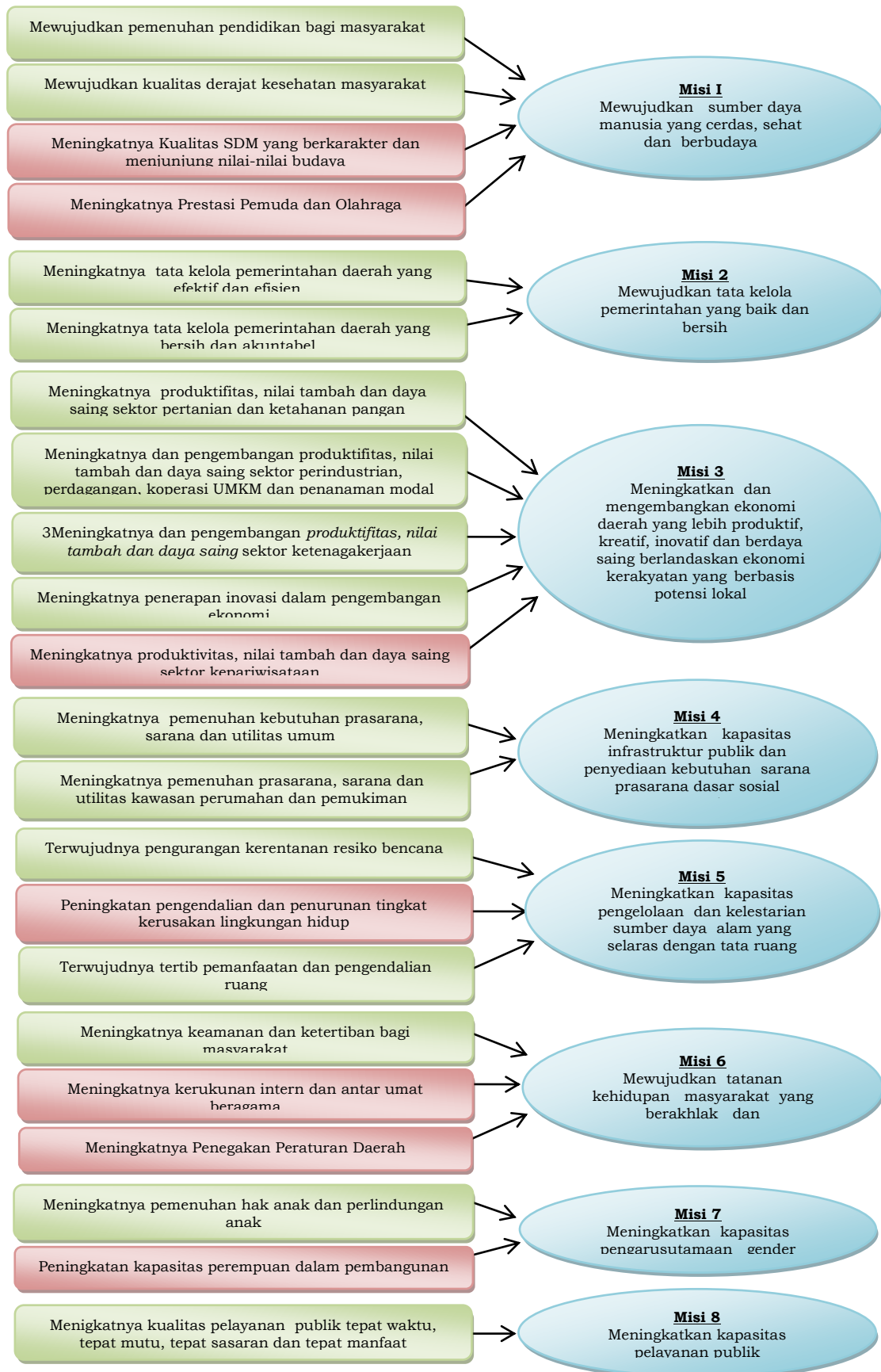
**Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021**

<b>Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021</b>			
<b>TAHAP KONSOLIDASI (Tahun 2016-2017)</b>	<b>TAHAP PEMANTAPAN (Tahun 2018-2019)</b>	<b>TAHAP PERCEPATAN (Tahun 2020-2021)</b>	<b>TAHAP PERWUJUDAN (Tahun 2021)</b>
a. Mewujudkan pemenuhan pendidikan bagi masyarakat. b. Mewujudkan kualitas derajat kesehatan masyarakat. c. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya. d. Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga, serta e. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.	a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat. c. Meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup, dan d. Mewujudkan pengurangan resiko bencana.	a. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. b. Mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, dan c. Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian Pancasila.

Sumber : RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

Apabila ditarik garis Korelasi antara Program Prioritas dan Misi Pembangunan Daerah dapat disajikan pada Diagram 2.1.

**Gambar 2.1**  
**Korelasi antara Sasaran dan Misi Pembangunan Daerah**



## 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.

### Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	1.1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka	92,39
		1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Angka	95,03
		1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Angka	88,08
		1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Angka	82,10
		1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Angka	64,44
		1.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Angka	96,65
		1.7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka	0,02
		1.8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka	0,10
		1.9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	97,79
		1.10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	buku	95,56
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian	2.1	Persentase balita gizi buruk	%	0,74
		2.2	Angka kematian ibu melahirkan	Angka	14
		2.3	Angka kematian bayi	Kasus	12

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	
	dan kecacatan	2.4	Angka kematian balita	Angka	15,8	
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	3.1	Persentase konsistensi perencanaan	%	74	
		3.2	Persentase penggunaan data statistik	%	92	
		3.3	Skor LPPD	Skor	2,73	
		3.4	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	83	
		3.5	Skor LKjIP	Skor	62	
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	4.1	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	
		4.2	Tingkat Muturitas SPIP	Tingkat	2	
		4.3	Tingkat Kapabilitas APIP	Tingkat	2	
5	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan	5.1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	%	11,76	
		5.2	Indeks Kecukupan Pangan	Indeks	91,45	
		5.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,75	
6	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan data saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM dan penanaman modal	6.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,76	
		6.2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,86	
		6.3	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	10	
		6.4	Persentase kenaikan koperasi aktif	%	0,30	
		6.5	Persentase kenaikan nilai investasi (%):	PMDN	%	1,81
				PMA	%	2,40
7	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan data saing sektor ketenagakerjaan	7.1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	25,55	
		7.2	Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani	%	81	
8	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pengembangan ekonomi	8.1	Persentase hasil inovasi masyarakat/hasil krenova/TTG yang dikembangkan	%	5	
9	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	9.1	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	%	56,92	
		9.2	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	%	61,82	
		9.3	Persentase irigasi dalam kondisi baik (%)	% km	58,45 19.122	
10	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana	10.1	Persentase air minum layak	%	90,4	
		10.2	Persentase sanitasi	%	93,00	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
	dan utilitas kawasan perumahan dan pemukiman		penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak		
		10.3	Rasio luasan kawasan kumuh perkotaan	%	52,00
		10.4	Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan	%	9,25
		10.5	Persentase penanganan RTLH	%	12,57
11	Terwujudnya pengukuran kerentanan resiko bencana	11.1	Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa)	%	1
12	Terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian ruang	12.1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	91
13	Meningkatnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat	13.1	Angka kriminalitas	Angka	2,82
		13.2	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	42,78
14	Peningkatan pemenuhan hak anak	14.1	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	4,7
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	15.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	91
		15.2	Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk	%	28,56

Sumber: Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

Sedangkan target kinerja tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang belum tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.

**Target Indikator Kinerja Utama RPJMD yang Belum Dipedomani  
Dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang  
Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 pada Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	1.1	Persentase kenaikan kunjungan perpustakaan	%	6,75
2	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya	2.1	Persentase kenaikan peserta festival seni dan budaya	%	55
		2.2	Persentase kenaikan kunjungan taman budaya	%	5
3	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	3.1	Tingkat prestasi pemuda	%	47
		3.2	Tingkat prestasi olahraga	%	36
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	4.1	Persentase pengelolaan arsip secara baku	%	3,61
		4.2	Persentase sistem berbasis informasi	%	15
		4.3	Persentase pengamanan informasi persandian	%	62
		4.4	Opini Kemenkeu terhadap kapasitas fiskal daerah	opini	0,21-0,3
5	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan	5.1	Tingkat konsumsi ikan	%	16,49
		5.2	Persentase kerusakan hutan dan lahan kritis	%	16,42
6	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan	6.1	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	%	3
7	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	7.1	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	61,75
		7.2	Rasio tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,066
		7.3	Persentase pengoperasian TPA (%)	%	26
		7.4	Tingkat keselamatan lalu lintas	%	90
8	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan pemukiman	8.1	Rasio cakupan elektrifikasi	%	96
9	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah	9.1	Persentase penegakan peraturan daerah	%	91,25
		9.2	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	ds/ke	401
10	Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama	10.1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	29,6
		10.2	Persentase peningkatan penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama	%	75
11	Peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan	11.1	Rasio perempuan korban kekerasan	%	1,5
		11.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	53,96
		11.3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	77,5
		11.4	Drop out akseptor KB	%	17
		11.5	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,05
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	12.1	Persentase peningkatan minat transmigrasi	%	35





### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

*Pembangunan berbasis kinerja* menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak. Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas instansi pemerintah dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, berisi :**  
3.1 *Capaian Kinerja Organisasi*  
3.2 *Evaluasi dan Analisis Kinerja*  
3.3 *Akuntabilitas Anggaran*  
3.4 *Efisiensi Sumber Daya*

Pentingnya *pengendalian dan evaluasi pelaksanaan* program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari

masing-masing sasaran strategis. Skala nilai peringkat kinerja disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

**Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Baik	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah.

Tabel 3.2.

**Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\leq 100$	Baik	
2	$\geq 99,9$	Tidak Baik	

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten

**3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2017 dengan mengacu Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 capaian disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

**Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja			
				Satuan	Rencana	Realisasi	%
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	1.1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka	92,39	78,17	85
		1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Angka	95,03	79,5	103
		1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Angka	88,08	90,93	103
		1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Angka	82,10	86,84	106
		1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Angka	64,44	68,22	106
		1.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Angka	96,65	88,28	91
		1.7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka	0,02	0,04	200
		1.8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka	0,10	0,23	230
		1.9	Angka kelulusan SD/MI	%	97,79	98,27	100,5
		1.10	Angka kelulusan SMP/ MTs	buku	95,56	98,11	103
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	2.1	Persentase balita gizi buruk	%	0,74	0,73	98,65
		2.2	Persentase kematian ibu melahirkan	Kasus	14	18	128,57
		2.3	Angka kematian bayi	Angka	12	10,15	84,58
		2.4	Angka kematian balita	Angka	15,8	1,69	10,70
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	5.1	Persentase konsistensi perencanaan	%	74	77	104,05
		5.2	Persentase penggunaan data statistik	%	92	27,2	29,57
		5.6	Skor LPPD	Skor	2,73	2,98	109,16
		5.7	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	83	83,21	100,25
		5.8	Skor LKJIP	Skor	62	53,01	85,5
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	6.1	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WDP	75
		6.2	Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat	2	2,79	139,50
		6.3	Tingkat Kapabilitas APIP	Tingkat	2	2	100,00
7	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan	7.1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	%	11,76	11,70	99,49
		7.2	Indeks Kecukupan Pangan	Indeks	91,45	91,45	100,00
		7.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,75	91,90	100,16
8	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM dan penanaman modal	8.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,76	35,94	103,39
		8.2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,86	17,03	90,30
		8.3	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	10	10,05	100,50
		8.4	Persentase kenaikan koperasi aktif	%	0,30	3,76	1253,33
		8.5	Persentase kenaikan nilai investasi (%): PMDN PMA	% % %	1,81 2,40	73,25 29,42	4046,96 1225,75
10	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan	10.1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	25,55	22,19	86,85
		10.2	Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani	%	81	100	123,46
11	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pengembangan ekonomi	11.1	Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan	%	5	2,5	50,00
12	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	12.1	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	%	56,92	61,15	107,43
		12.3	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	%	61,82	52,63	85,13
		12.4	Persentase irigasi dalam kondisi baik (%) (atau luasan irigasi dalam kondisi baik)	%	58,45 19.112	22,04 7.208	37,71 37,71
13	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan pemukiman	13.1	Persentase air minum layak	%	90,4	84,74	93,74
		13.2	Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak	%	93	90,80	97,63
		13.3	Rasio luasan kawasan kumuh perkotaan	%	52	1,18	2,27
15	Terwujudnya pengukuran kerentanan resiko bencana	15.1	Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa)	%	1	3	300,00
16	Terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian ruang	16.1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	91	65	71,43
17	Meningkatnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat	17.1	Angka kriminalitas	%	2,82	3,25	115,25
		17.2	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Angka	42,78	35,52	83,03
21	Peningkatan pemenuhan hak anak	21.1	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	4,7	3,29	70,00
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	22.2	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	91	92,76	101,93
		22.3	Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk	%	28,56	84,95	297,44

Disamping Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana Tabel 3.3. di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 masih ada target kinerja yang tidak tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.4. Adapun capaian kinerja organisasi pada tahun 2017 disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.  
**Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja			
				Satuan	Rencana	Realisasi	%
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	1.11	Persentase kenaikan kunjungan perpustakaan	%	6,75	1,14	16,88
3	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya	3.1	Persentase kenaikan peserta festival seni dan budaya	%	55	155	281,82
		3.2	Persentase kenaikan kunjungan taman budaya	%	5	0	0,00
4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	4.1	Tingkat prestasi pemuda	%	47	50	106,38
		4.2	Tingkat prestasi olahraga	%	36	73	202,78
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	5.3	Persentase pengelolaan arsip secara baku	%	3,61	5,62	155,62
		5.4	Persentase sistem berbasis informasi	%	15	0,34	2,27
		5.5	Persentase pengamanan informasi persandian	%	62	27,35	44,11
		5.9	Opini Kemenkeu terhadap kapasitas fiskal daerah	opini	0,21-0,3	1,28	426,67
7	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan	7.4	Tingkat konsumsi ikan	%	16,49	18,5	112,19
		7.5	Persentase kerusakan hutan dan lahan kritis	%	16,42	15,76	95,98
9	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan	9.1	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	%	3	84,36	2811,89
12	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	12.2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	61,75	81,32	131,69
		12.5	Rasio tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,066	0,172	260,61
		12.6	Persentase pengoperasian TPA (%)	%	26	33,33	128,19
		12.7	Tingkat keselamatan lalu lintas	%	90	99,77	110,86
13	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan pemukiman	13.4	Rasio cakupan elektrifikasi	%	96	95	98,96
		13.5	Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan	%	9,25	1,41	15,24
		13.6	Persentase penanganan RTLH	%	12,57	9,60	76,37
14	Peningkatan pengendalian dan penurunan kerusakan lingkungan hidup	14.1	Status udara	indeks	29	83,3	287,24
		14.2	Status air	indeks	39	18,28	63,04
		14.3	Lahan tutupan		29	42,54	146,69
18	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah	18.1	Persentase penegakan peraturan daerah	%	91,25	92,2	101,04
		18.2	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	ds/ke	401	401	100,00
19	Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama	19.1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	29,6	30,13	101,79
		19.2	Persentase peningkatan penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama	%	75	85	113,33
20	Peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan	20.1	Rasio perempuan korban kekerasan	%	1,5	0,25	16,67
		20.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	53,96	21,03	38,97
		20.3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	77,5	59,89	77,28
		20.4	Drop out akseptor KB	%	17	14	82,35

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja			
				Satuan	Rencana	Realisasi	%
		20.5	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,05	1,03	98,10
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	22.3	Persentase alih fungsi lahan tanah pertanian menjadi non pertanian	%	0,1650	0,1359	82,36
		22.4	Persentase peningkatan minat transmigrasi	%	35	63,86	182,46

**Berdasarkan hasil pengukuran kinerja** terhadap 22 (dua puluh dua) sasaran strategis dengan 79 (tujuh puluh sembilan) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) indikator yang sifatnya progresif, dan 10 (sepuluh) indikator yang sifatnya represif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

**A. Indikator Progresif**, dengan hasil: a. Sebanyak 46 (empat enam) Indikator Kinerja sasaran atau sebanyak 58,23 % dengan kriteria **Sangat Baik**; b. Sebanyak 11 (sebelas) atau sebanyak 13,92 % dengan kriteria **Tinggi**; c. Sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 5,06% dengan kriteria **Sedang**; d. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,27 % belum bisa dikreteria karena belum ada data; dan e. Sebanyak 8 (delapan) atau sebanyak 10,13 % dengan kriteria **Sangat Rendah**; Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

- a. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kriteria **sangat baik**, atau interval nilai realisasi kinerja  $\geq 90,1$  sebanyak 46 (empat enam), yaitu :
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A;
  2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B;
  3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A;
  4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B;
  5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA;
  6. Angka kelulusan SD/MI;
  7. Angka kelulusan SMP/ MTs;
  8. Persentase kenaikan peserta festival seni dan budaya;



9. Tingkat prestasi pemuda;
10. Tingkat prestasi olahraga;
11. Persentase konsistensi perencanaan;
12. Persentase pengelolaan arsip secara baku;
13. Skor LPPD;
14. Indeks profesionalitas ASN;
15. Opini Kemenkeu terhadap kapasitas fiskal daerah;
16. Tingkat Muturitas SPIP;
17. Tingkat Kapabilitas APIP;
18. Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB;
19. Indeks Kecukupan Pangan;
20. Skor Pola Pangan Harapan (PPH);
21. Tingkat konsumsi ikan;
22. Persentase kerusakan hutan dan lahan kritis;
23. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
24. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB;
25. Persentase UMKM yang memiliki daya saing;
26. Persentase kenaikan koperasi aktif;
27. Persentase kenaikan nilai investasi PMDN;
28. Persentase kenaikan nilai investasi PMA;
29. Persentase kenaikan kunjungan wisatawan;
30. Persentase kasus penyelesaian hubungan pekerja dan perusahaan tertangani;
31. Persentase jalan dalam kondisi baik (%);
32. Persentase jembatan dalam kondisi baik (%);
33. Rasio tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk
34. Persentase pengoperasian TPA (%);
35. Tingkat keselamatan lalu lintas;
36. Status udara;
37. Lahan tutupan;
38. Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa);

39. Persentase penegakan Peraturan Daerah;
  40. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  41. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk;
  42. Persentase peningkatan penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama;
  43. Laju pertumbuhan penduduk;
  44. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk;
  45. Rasio penduduk ber\_akta kelahiran per satuan penduduk; dan
  46. Persentase peningkatan minat transmigrasi.
- b. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria **tinggi**, atau interval nilai realisasi kinerja  **$75,1 \leq 90$**  sebanyak 11 (sebelas), yaitu :
1. Angka Partisipasi Kasar PAUD;
  2. Skor LKjIP;
  3. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan;
  4. Persentase drainase dalam kondisi baik (%);
  5. Persentase air minum layak;
  6. Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak;
  7. Rasio cakupan elektrifikasi;
  8. Persentase penanganan RTLH;
  9. Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial;
  10. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah; dan
  11. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta.
- c. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria **sedang**, atau interval nilai realisasi kinerja  **$65,1 \leq 75$**  sebanyak 4 (empat), diantaranya :
1. Opini BPK terhadap LKPD;
  2. Status air;

3. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang; dan
  4. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- d. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria **rendah**, atau interval nilai realisasi kinerja **50,1 ≤ 65** tidak ada.
- e. Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kreteria **sangat rendah**, atau interval nilai realisasi kinerja ≤ 50 sebanyak 8 (delapan), yaitu:
1. Persentase Kenaikan kunjungan perpustakaan;
  2. Persentase penggunaan data statistik;
  3. Persentase sistem berbasis informasi;
  4. Persentase pengamanan informasi persandian;
  5. Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan;
  6. Persentase irigasi dalam kondisi baik (%)(luasan irigasi dalam kondisi baik);
  7. Rasio luasan kawasan kumuh perkotaan; dan
  8. Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan.

Berdasarkan [Capaian Kinerja Organisasi](#) Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan [Skala Nilai Peringkat Kinerja](#) sebagaimana diatur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.1.

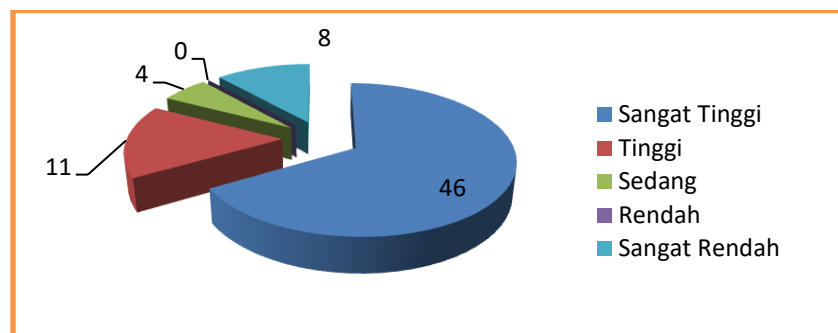


Diagram 3.1. Peringkat Kinerja Progresif

**B. Indikator Represif**, dengan hasil: a. Sebanyak 6 (enam) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 60 % dengan kriteria **Baik (Berhasil Menekan)**, b. Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 40 % dengan kriteria **Tidak Baik (Melampaui Target yang ditetapkan)**, Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kriteria **baik**, yaitu:

1. Persentase balita gizi buruk;
2. Angka kematian bayi;
3. Rasio perempuan korban kekerasan;
4. Drop out akseptor KB;
5. Angka kematian balita; dan
6. Persentase alih fungsi lahan tanah pertanian menjadi non pertanian.

b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kriteria tidak baik, yaitu:

1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI;
2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs;
3. Angka Kematian Ibu Melahirkan; dan
4. Angka Kriminalitas.

Berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif maka diperoleh data sebagaimana Diagram 3.2.

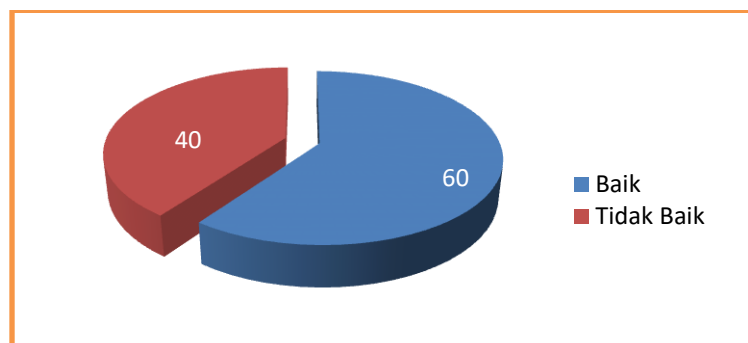


Diagram 3.2. Peringkat Kinerja Represif

- C. Disamping itu ada 1 (satu) indikator, baik target maupun realisasi masih 0 (kosong), yakni Indikator Persentase kenaikan kunjungan taman budaya.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

#### 1. Sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Masyarakat;

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pendidikan menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk mewujudkan sasaran pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Klaten disusun berdasarkan pendekatan 6 (enam) pilar strategis, yakni: 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2). Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life-skill*), 4). Pendidikan Keaksaraan, 5). Pengarusutamaan gender, dan 6). Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Adapun capaian sasaran terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.

#### Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	92,19	92,39	78,17	85	93,19	83,88
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	94,53	95,03	79,5	84	97,03	81,93
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	87,58	88,08	90,93	103	90,08	100,94
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	81,6	82,10	86,84	106	84,10	103,26
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	63,94	64,44	68,22	106	66,44	102,68
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	96,64	96,65	88,28	91	96,69	91,30

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02	0,02	0,04	200	0,01	400,00
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,1	0,10	0,23	230	0,05	460,00
9	Angka kelulusan SD/MI	97,78	97,79	98,27	100,5	97,83	100,45
10	Angka kelulusan SMP/MTs	95,55	95,56	98,11	103	95,60	102,63
11	Persentase kenaikan kunjungan perpustakaan		6,75	1,14	16,88	8,75	14,17

#### a. Angka Partisipasi Kasar PAUD

Salah satu upaya perluasan dan pemerataan pelayanan akses pendidikan adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak usia dini (*sampai ≤ 6 tahun*) yang dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk memberikan bekal dan kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Angka partisipasi kasar penduduk yang terlayani pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Selama lima tahun terakhir (tahun 2013-2017) cenderung mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pendidikan anak usia dini menjadi keharusan dan kebutuhan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan, dan seiring dengan munculnya kebijakan pendidikan non formal bagi pengembangan Anak Usia Dini (PAUD). Sebagai gambaran APK PAUD di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel 3.6.

Tabel 3.6.

#### **Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
APK PAUD	55,73	58,32	92,19	92,37	78,17

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

## b. Angka Partisipasi Pendidikan Dasar

Angka partisipasi pendidikan dasar yang dimaksud dalam pengertian ini adalah Angka Partisipasi Kasar yang dirumuskan dengan jumlah penduduk pada tahun ke- t dari berbagi usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk pada tahun ke- t yang berada pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dikalikan seratus.

Angka partisipasi kasar penduduk yang terlayani pada jenjang Pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) selama lima tahun terakhir (tahun 2013-2017) cenderung mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pendidikan dasar menjadi keharusan dan kebutuhan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan, dan seiring dengan munculnya kebijakan Wajardikdas (pendidikan dasar sembilan tahun). Sebagai gambaran APK pendidikan dasar di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel 3.7.

Tabel 3.7.

### **Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
APK SD /MI /SDLB /Paket A	92,80	92,97	94,51	105,23	79,5
APK SMP/MTs/SMP/MTs/Paket B	94,73	87,04	87,58	97,57	90,93

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

Berdasarkan data Tabel 3.7. di atas, karakteristik kenapa APK untuk jenjang pendidikan SD/MI ada yang menonjol, misalnya Kecamatan Wedi, Delanggu, Klaten Utara dan Klaten Tengah hal ini disebabkan karena ada beberapa sekolah swasta yang sebagian besar siswanya berasal dari kecamatan lain. Umumnya anak bersekolah di SD swasta karena sekolah yang bersangkutan memiliki keunggulan khusus dan seazas dengan keinginan orang

tuanya untuk menyekolahkan anaknya agar mendapatkan pendidikan moralitas dan rasa nyaman untuk belajar.

Sementara itu, anak usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs di kecamatan Kebonarum, Karangnongko, Juwiring, Polaharjo dan Klaten Selatan lebih suka memilih di sekolah di luar kecamatannya sendiri, hal ini disebabkan karena jarak sekolah dan mutu sekolah menjadi pertimbangan utama kenapa memilih sekolah di luar kecamatannya, disamping ada tradisi untuk mengikuti kakak-kakak terdahulunya.

**c. Angka Partisipasi Murni**

Angka partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2013 sudah mencapai 78,46%, naik menjadi 86,84% pada tahun 2017. Begitu juga untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2013 sudah mencapai 65,13% menjadi 68,22% pada tahun 2017, hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Secara lengkap, perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8.

**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
APM SD /MI /SDLB Paket A	78,46	79,13	81,59	91,26	86,84
APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B	65,13	62,48	63,96	72,77	68,22

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)



Dengan catatan, perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten untuk semua Jenjang Pendidikan sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat-saat tertentu, mengingat Klaten diapit dua kota besar Yogyakarta dan Solo.

**d. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA**

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tahun 2013 sudah mencapai 82,32%, naik menjadi 88,28% pada tahun 2017. Hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Secara lengkap, perkembangan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9.

**Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Tahun 2013-2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	82,32	89,16	96,64	92,43	88,28

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018

**e. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs**

Selama lima tahun terakhir (tahun 2013-2017) angka putus sekolah yang diukur dengan jumlah anak putus sekolah bersifat fluktuatif, sekalipun adanya dana alokasi khusus bidang pendidikan, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi sedikit banyak menekan jumlah anak putus sekolah. Sebagai gambaran perkembangan persentase angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10.  
**Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut  
 Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten  
 Tahun 2013-2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/MI	Kasus	56	28	22	33
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/MTS	Kasus	59	24	42	43

*Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)*

Berdasarkan Tabel 3.10. di atas tinggi angka putus sekolah, untuk jenjang pendidikan SMK terutama di SMK swasta, mengkondisikan bahwa kualitas lembaga yang bersangkutan hanya dapat memperoleh siswa yang kurang berprestasi, disamping layanan pendidikan kejuruan belum bisa memberi jaminan kebutuhan lapangan kerja. Dipihak lain, anak usia sekolah jenjang pendidikan SMA/MA/SMK lebih ingin cepat bekerja di sektor non formal (pekerja/tukang perumahan) daripada sekolah formal berlama-lama.

**f. Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs/SMPLB/Paket B**

Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang bersifat fluatatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2013 sudah mencapai 99,40%, turun menjadi 98,27% pada tahun 2017. Begitu juga untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B cenderung mengalami penurunan pada tahun 2013 mencapai 98,47 %, pada tahun 2017 menjadi 98,11%. Hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu berkeinginan sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikan. Secara lengkap, perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11.  
**Perkembangan Angka Kelulusan (AL)  
 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AL SD /MI /SDLB /Paket A	99,40	98,11	97,78	99	98,27
APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B	65,13	62,48	63,96	72,77	68,22

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

**g. Persentase Kenaikan Kunjungan Perpustakaan**

Pada tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 46.077 mengalami kenaikan sebanyak 1,14% (naik 519 pengunjung) dibanding tahun 2016 sebanyak 45.558 pengunjung. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi informasi sehingga lebih mudah dan cepat memperoleh informasi. Adapun Perkembangan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12.  
**Perkembangan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten  
 Klaten Tahun 2013- 2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah pengunjung perpustakaan	28.796	40.976	43.661	45.558	46.077

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pemenuhan pendidikan untuk semua bagi masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis **Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Masyarakat** terdiri dari 7 (tujuh) program, yaitu:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun;
3. Pendidikan Non Formal;

4. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Manajemen Pelayanan Pendidikan; dan
6. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

### **Permasalahan**

**Urusan Pendidikan** dengan permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Masih tingginya angka anak usia sekolah, tetapi tidak sekolah;
2. Belum semua guru memenuhi kualifikasi standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1);
3. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
4. Belum optimalnya penanaman nilai-nilai moralitas, budi pekerti dan integritas; dan
5. Kurang meratanya penyebaran jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar, terutama pada SD Negeri yang memungkinkan untuk diregruping.

### **Solusi**

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan pendidikan, diantaranya:

1. Perlunya peningkatan kualitas pamong belajar untuk mendampingi dan atau menekan anak putus sekolah dengan belajar mandiri;
2. Perlunya sertifikasi dan peningkatan kualifikasi guru agar memiliki standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1); dan
3. Perlunya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan.

## 2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat;

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya Urusan Kesehatan dengan parameter aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Juga dasar Undang-Undang 23 Tahun 2014 urusan kewenangan daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan urusan kesehatan mencakup diantaranya: 1. Upaya kesehatan; 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan; 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; dan 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Adapun capaian sasaran terwujudnya Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat sebagaimana Tabel 3.13.

Tabel 3.13.

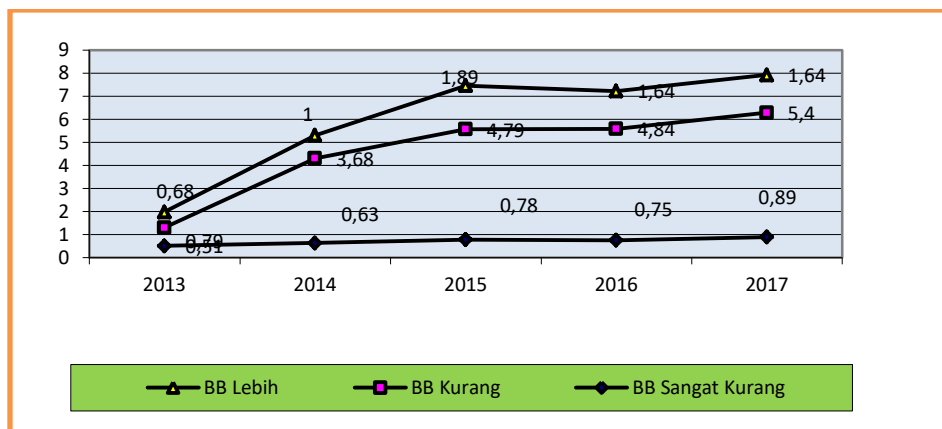
### Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase balita gizi buruk	0,75	0,74	0,73	98,65	0,7	95,89
2	Angka kematian ibu melahirkan	15	14	18	128,57	10	55,56
3	Angka kematian bayi	12,5	12	10,15	84,58	10	98,52
4	Angka kematian balita	15,9	15,8	1,69	10,70	15,3	905,33

#### a. Persentase balita Gizi Buruk

Kondisi Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab balita gizi buruk karena kondisi

sosial ekonomi keluarga, juga faktor medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus balita gizi buruk yang tinggi, seperti kecamatan: Gantiwarno, Trucuk dan Jogonalan. Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Klaten selama Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Grafik 3.1.



Grafik 3.1 Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017

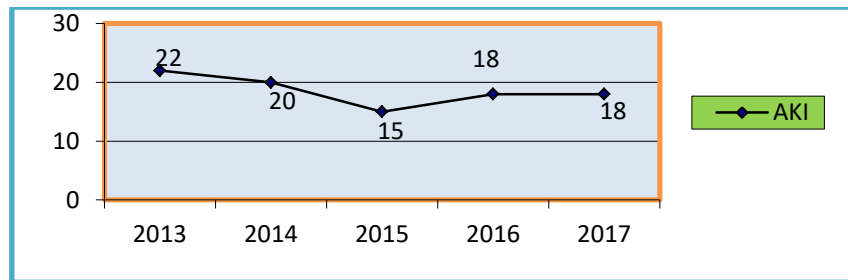
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2018 (diolah)

Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 14 (atau 0,022% dari total jumlah anak 68.558) kasus anak menderita gizi buruk. Upaya yang dilakukan untuk menekan kasus gizi buruk dengan memberikan makanan tambahan untuk bayi (PMTAS).

#### **b. Angka Kematian Ibu Melahirkan**

Kondisi Angka Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi, yang diantaranya adalah kecamatan: Wedi dan Juwiring. Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di

Kabupaten Klaten selama Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Grafik 3.2.

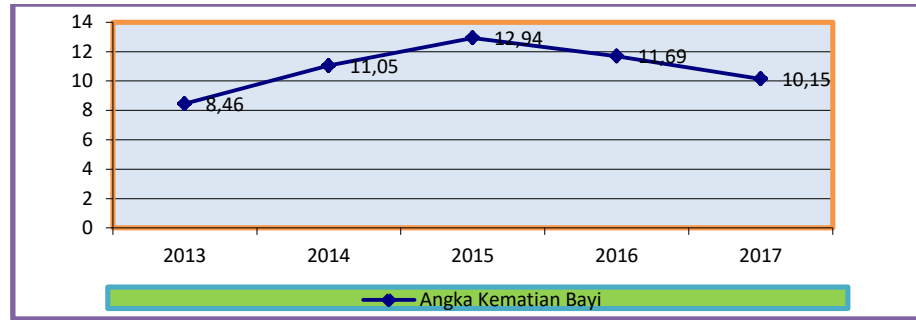


Grafik 3.2. Perkembangan Kasus Kematian Ibu Tahun 2013-2017  
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 18 kasus kematian ibu melahirkan (atau AKI 106,84 dari total jumlah ibu melahirkan sebanyak 16.848). Upaya yang dilakukan untuk menekan kasus kematian ibu melahirkan dengan meningkatkan penanganan komplikasi kebidanan dengan peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

### c. Angka Kematian Bayi

Kondisi Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan. Penyebab kematian bayi di samping karena pengaruh ibu dalam kondisi hipertensi dan pendarahan, juga diakibatkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi, seperti kecamatan: Bayat, Juwiring, Pedan dan Jogonalan. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Grafik 3.3.



Grafik 3.3. Perkembangan Persentase Angka Kematian Bayi Tahun 2013-2017

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 197 kasus kematian bayi (atau AKB 10,15 dari total kelahiran hidup sebanyak 16.848). Sementara itu tercatat sebanyak 32 kasus kematian balita (atau Angka Kematian Balita 1,69 dari total anak balita sebanyak 69.069). Upaya yang dilakukan untuk menekan kasus kematian bayi melahirkan dengan meningkatkan penanganan komplikasi kebidanan dengan peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan cakupan kunjungan bayi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat** terdiri dari 13 (tiga belas) program, diantaranya:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Obat dan Perbekalan Kesehatan;
3. Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Pengembangan Lingkungan Sehat;
7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan;



9. Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin;
10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
11. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
12. Peningkatan Pelayanan kesehatan lansia; dan
13. Manajemen informasi dan regulasi kesehatan.

### **Permasalahan**

**Urusan Kesehatan** dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Masih diketemukannya kasus kematian ibu dan bayi.
2. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemik flu burung, serta penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya:
  - a. Demam berdarah dengue .
  - b. Malaria
  - c. Filariatis
3. Untuk jenis penyakit menular / infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya:
  - a. Penyakit menular Tuberculosis paru
  - b. Kusta penderita PB
  - c. Diare
  - d. Infeksi Saluran Pernapasan atas
  - e. HIV
  - f. Kejadian luar biasa KIPI

4. Keadaan gizi : Berat Badan (BB) naik, BB di bawah garis merah dan Gizi buruk
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan.
6. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi, dan
7. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

### **Solusi**

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

1. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat;
2. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan antenatal care (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.

### **3. Sasaran Meningkatnya SDM yang Berkualitas dan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya;**

Peningkatan SDM yang berkualitas dan menjunjung nilai-nilai budaya tercermin ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Ukuran peningkatan SDM yang berkualitas dan menjunjung nilai-nilai budaya diukur: 1). Persentase kenaikan peserta festival seni dan budaya, dan 2). Persentase kenaikan kunjungan taman budaya.

Adapun capaian sasaran meningkatnya SDM yang berkualitas dan menjunjung nilai-nilai budaya sebagaimana Tabel 3.14.

Tabel 3.14.

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja  
Meningkatnya SDM yang Berkualitas dan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase kenaikan peserta festival seni dan budaya		55	155	281,82	95	163,16
2	Persentase kenaikan kunjungan taman budaya		5	0	0,00	15	0

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran yang dilakukan terkait peningkatan SDM yang berkualitas dan menjunjung nilai-nilai budaya, dan pada tahun 2017 program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya SDM yang berkualitas dan menjunjung nilai-nilai budaya, diantaranya:

1. Program pengembangan nilai budaya,
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dan
3. Program pengelolaan keragaman budaya.

#### **Permasalahan**

Permasalahan pelaksanaan urusan kebudayaan, diantaranya:

1. Belum optimalnya pelestarian sejarah dan cagar budaya.
2. Belum optimalnya promosi budaya daerah, serta belum efektifnya sistem inventarisasi dan penyajian informasi mengenai jenis dan ragam budaya daerah.
3. Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya daerah melalui kepemilikan HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual).

#### **Solusi**

1. Peningkatan pelestarian sejarah dan permuseuman melalui penguatan kebijakan daerah.
2. Peningkatkan promosi budaya daerah, dan penyajian informasi mengenai jenis dan ragam budaya daerah.

3. Fasilitasi perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya daerah melalui kepemilikan HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual).

#### 4. Sasaran Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga;

Dalam rangka peningkatan peran kepemudaan dan olahraga di daerah, ditempuh dengan upaya Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan Peningkatan budaya dan prestasi olahraga. Ukuran peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga diukur: 1). Tingkat prestasi pemuda, dan 2). Tingkat prestasi olahraga.

Adapun capaian sasaran meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga sebagaimana Tabel 3.15.

Tabel 3.15.

#### **Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Tingkat prestasi pemuda		47	50	106,38	55	90,91
2	Tingkat prestasi olahraga		36	73	202,78	52	140,38

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran yang dilakukan terkait peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, dan pada tahun 2017 program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, diantaranya:

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan,
2. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda,
3. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga,
4. Program pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga, dan
5. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

### **Permasalahan**

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, menghadapi permasalahan:

1. Belum adanya pola pembinaan yang berkelanjutan untuk menunjang partisipasi pemuda aktif dalam pembangunan daerah;
2. Belum optimalnya prestasi keolahragaan karena belum memadainya pemihakan anggaran dari pemerintah daerah;
3. Rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi olah raga;
4. Belum optimalnya pembinaan olahraga bagi atlet difabel; dan
5. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga, serta masih lemahnya manajemen dan pemasyarakatan olahraga yang berorientasi prestasi.

### **Solusi**

1. Peningkatan pola pembinaan yang berkelanjutan untuk menunjang partisipasi pemuda aktif dalam pembangunan daerah;
2. Peningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi olah raga; dan
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga, serta pemasyarakatan olahraga yang berorientasi prestasi.

### **5. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien;**

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur dari saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai road map untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga

output, outcome dan benedite akan kelihatan progres capaiannya.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien sebagaimana Tabel 3.16.

Tabel 3.16.

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja  
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**

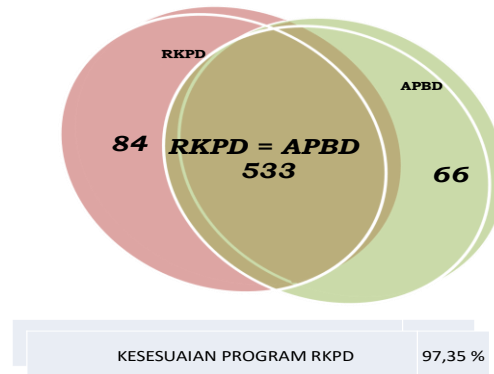
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase konsistensi perencanaan	71	74	77	104,05	90	85,56
2	Persentase penggunaan data statistik	90	92	27,2	29,57	100	27,20
3	Persentase pengelolaan arsip secara baku		3,61	5,62	155,62	18,05	31,14
4	Persentase sistem berbasis informasi		15	0,34	2,27	37	0,92
5	Persentase pengamanan informasi persandian		62	27,35	44,11	70	39,07
6	Skor LPPD	2,7	2,73	2,98	109,16	2,85	104,56
7	Indeks profesionalitas ASN	81	83	83,21	100,25	90	92,46
8	Skor LKjIP	60	62	53,01	85,5	70	<b>75,73</b>
9	Opini Kemenkeu terhadap kapasitas fiskal daerah		0,21-0,3	1,28	426,67	0,61-1	<b>128</b>

**a. Persentase Konsistensi Perencanaan**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 merupakan implementasi dan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Persentase konsistensi perencanaan dilihat dari perbandingan jumlah Program dan Kegiatan menurut masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017, disandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun

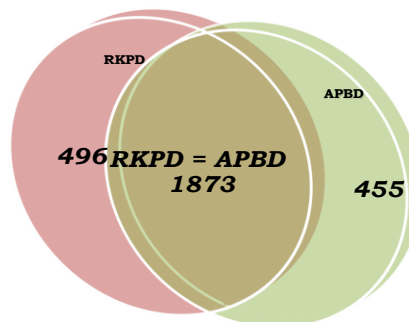
2017 dapat disajikan dalam *diagram 3.3.* sebagai berikut:

KESESUAIAN ANTARA PROGRAM RKPD DENGAN APBD  
TAHUN 2017



Berdasarkan *diagram vent* di atas, artinya ada sebanyak 84 program dalam RKPD, tetapi tidak ada dalam APBD (atau muncul sebanyak 66 program baru saat penetapan APBD), dan ada sebanyak 533 program yang sama antara RKPD dan APBD. Sedangkan kesesuaian antara kegiatan RKPD dengan APBD sebagaimana *diagram 3.4.* berikut:

KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN RKPD DENGAN APBD  
TAHUN 2017



Berdasarkan *diagram vent* di atas, artinya ada sebanyak 496 kegiatan dalam RKPD, tetapi tidak ada dalam APBD (atau muncul sebanyak 455 kegiatan baru saat

penetapan APBD), dan ada sebanyak 1873 kegiatan yang sama antara RKPD dan APBD.

#### **b. Persentase Penggunaan Data Statistik**

Berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat harus didukung ***data dan informasi pelaksanaan pembangunan***.

Capaian indikator kinerja persentase penggunaan data statistik diukur dari jumlah produk data sebanyak 25 buah ***dibagi*** target persentase penggunaan data statistik (sebanyak 92) ***dikalikan*** 100% menghasilkan 27,2%.

Memperhatikan ketentuan di atas, perencanaan pembangunan daerah harus didukung ***base line data dan informasi pembangunan*** yang akurat, dan tepat manfaat. Data dan informasi dalam : ***Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2017*** merupakan jawaban untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sekaligus sebagai tolok ukur capaian kinerja RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, dan sekaligus sebagai upaya kita mendukung terwujudnya masyarakat Klaten yang ***Maju, Mandiri dan Berdaya Saing***.



**c. Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku**

Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 80.200 arsip, dan yang dikelola secara baku sebanyak 4.507 arsip (atau 5,62%) yang tersebar di 59 (lima puluh sembilan) perangkat daerah dan jumlah arsip yang tidak dikelola sebanyak 75.693 arsip (atau 94,38%).

**d. Persentase Sistem Berbasis Informasi**

Pada tahun 2017 persentase sistem berbasis informasi sebanyak 0,34% diukur dari jumlah sistem informasi milik Pemerintah Kabupaten Klaten sebanyak 20 sistem berbasis informasi ***dibagi*** jumlah satuan kerja perangkat daerah (sebanyak 59 perangkat daerah) ***dikalikan*** 100%

**e. Persentase Pengamanan Informasi Persandian**

Pada tahun 2017 persentase **Pengamanan Informasi Persandian** sebanyak 27,35% diukur dari jumlah surat/berita yang mendapatkan pengamanan persandian sebanyak 463 berita ***dibagi*** jumlah surat/berita biasa yang masuk sebanyak 1693 berita/surat ***dikalikan*** 100%

**f. Skor LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)**

Dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 telah ditetapkan adanya kebijakan daerah untuk : *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih* yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan meningkatkan efektivitas Organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan Mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah) Kabupaten Klaten tahun 2017 dengan ***skor 2,98*** tergolong ***tinggi***. Ke depan untuk memperbaiki

peringkat EKPPD diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi secara lebih intensif dengan sesama Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. Melakukan pendampingan/desk dengan OPD dalam mengisi format EKPPD; dan
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat).

**g. Indeks Profesionalitas ASN**

Tuntutan profesionalitas aparatur sipil negara merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai kewajiban pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan pemerintah. Capaian indeks profesionalitas ASN pada tahun 2016 sebesar 91,57% (kategori sangat tinggi), dan pada tahun 2017 turun menjadi 83,21% (tinggi). Adapun rekapitulasi capaian indeks profesionalitas ASN pada tahun 2017 disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17.  
Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2016-2017

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2016		Tahun 2017	
			Capaian Kinerja	Kategori	Capaian Kinerja	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kompetensi ASN	% ASN yang memenuhi target SKP	99,99	Sangat Tinggi	99,99	Sangat Tinggi
		% pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	85,71	Tinggi	23,75	Sangat Rendah
		Rata-rata tk. Kehadiran ASN dlm satu tahun	90,66	Tinggi	95	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas layanan adm. kepegawaian	IKM	89,66	Tinggi	89,73	Tinggi
		Tingkat akurasi data kepegawaian	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan dan aset	skor nilai peringkat kinerja	75	Sedang	75	Sedang
		% temuan pengelolaan anggaran OPD oleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
Nilai Rata-rata			91,57	Sangat Tinggi	83,21	Tinggi

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2018 (diolah)

#### **h. Skor LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)**

Tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan kewajiban pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan pemerintah. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 mengupayakan pentingnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan meningkatkan efektivitas Organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan Mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang meningkat. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 dengan nilai 62, namun terealisasi 53,01 (dengan Kategori CC). Perolehan skor 53,01 dengan kriteria **cukup**.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa ikhtisar penting terkait penilaian kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh nilai 53,01 atau dengan predikat CC. Secara rinci hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:
  - a. Perencanaan kinerja nilai 17,60;
  - b. Pengukuran kinerja nilai 11,74;
  - c. Pelaporan kinerja nilai 9,34;
  - d. Evaluasi kinerja nilai 4,66; dan
  - e. Capaian kinerja nilai 9,68.
2. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten;

3. Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun akuntabilitas kinerja di semua jenjang pemerintahan dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup: 1) perencanaan kinerja, 2) pengukuran kinerja, 3) pelaporan kinerja, 4) evaluasi kinerja dan capaian kinerja;
4. Secara umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten adalah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan, agar kinerja pada instansi pemerintah terus mengalami peningkatan;

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

1. Mereviu dan perbaikan penetapan indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) sesuai kriteria indikator kinerja yang baik dan menetapkan target kinerja dengan baik terhadap dokumen-dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD/Renstra/IKU) untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKT/Perjanjian Kinerja/RKPD/Renja/RKA) yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil;
2. Memperbaiki pemenuhan indikator IKU melalui mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, didukung dengan anggaran yang memadai serta dilakukan reviu secara lengkap;
3. Melakukan perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja berdasarkan informasi yang dapat diandalkan, untuk dapat menyajikan pencapaian IKU dan perbandingan data yang memadai, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penilaian kinerja;

4. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi program agar dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai keberhasilan program; dan
5. Pemantauan rencana aksi agar dilaksanakan secara berkala dan hasilnya sebagai dasar untuk perbaikan pelaksanaan program yang ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata.

**i. Opini Kemenkeu Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah**

Berdasarkan Opini Kemenkeu Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah pada tahun 2017, Kabupaten Klaten mendapatkan opini 1,28 (*satu koma dua puluh delapan*) dengan ***kategori Tinggi***, dengan pengertian kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien** terdiri dari 15 (lima) program, yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
4. Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya;
5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

6. Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan;
7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
8. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media;
9. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur;
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
13. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
14. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; dan
15. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

**Permasalahan :**

1. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat; dan
2. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang kredibel.

**Solusi :**

1. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD; dan
2. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat pengukuran kinerja dan mengambil tindakan/ intervensi tepat waktu apabila diperlukan.

## **6. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel;**

Untuk mewujudkan sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel* sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator-indikator kinerja, diantaranya: Opini BPK terhadap LKPD, Tingkat Maturitas SPIP, dan Tingkat Kapabilitas APIP.

Opini BPK terhadap LKPD merupakan penilaian atas kinerja keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik. Dasar penilaian BPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan ketentuan ini pemeriksaan dilakukan secara periodik setiap tahun, dan pemeriksaan ini mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat, terdiri atas: Tidak Wajar (TD), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sedangkan penilaian indikator maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dilaksanakan untuk memastikan dan mengurangi terjadinya penyimpangan/penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai melalui aparat pengawas intern, sehingga didapat atas pelaksanaan pembangunan yang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

Adapun capaian sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel* sebagaimana Tabel 3.18.

Tabel 3.18.  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja  
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan  
Akuntabel**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WDP	75	WTP	75
2	Tingkat Maturitas SPIP	1	2	2,29	114,50	3	76,3
3	Tingkat Kapabilitas APIP	2	2	2	100	3	66,67

**a. Opini BPK terhadap LKPD**

Realisasi atas target kinerja keuangan menunjukkan hasil kinerja menurun bila dibanding tahun sebelumnya, atau menghasilkan opini penilaian *WDP (Wajar Dengan Pengecualian)*. Sekalipun kinerja yang dilaksanakan sudah merupakan komitmen bersama disemua jajaran pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, transparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara. Adapun Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016 disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19.  
**Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten  
Tahun 2013-2016**

Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2013	WDP	Paragraf penjas berupa: penataan usaha persediaan di 43 SKPD tidak sesuai dengan pengelolaan aset tetap tidak tertib, realisasi intensif dan biaya pemungutan pajak daerah melebihi ketentuan, penganggaran dan pelaksanaan bantuan keuangan tidak sesuai ketentuan, serta sub pekerjaan speaker pembangunan Masjid Agung tahap II tidak sesuai spesifikasi.
2014	WDP	Paragraf penjas berupa : Belum memadainya pengelolaan aset tetap dan pengelolaan retribusi izin gangguan dan retribusi izin mendirikan bangunan, kurang memadainya pengelolaan penempatan dana cadangan serta kelebihan pembayaran atas selisih



Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
		harga timpang dan kekurangan volume pekerjaan.
2015	WTP	Paragraf penjelas berupa: berlarutnya pekerjaan pembangunan menara Masjid Agung, belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.
2016	WDP	Paragraf penjelas berupa: a). pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum tertib, diantaranya kegiatan inventarisasi data aset tetap KIB B dan KIB E di Dinas Pendidikan belum selesai dan Pemkab belum mengatur tentang kebijakan penambahan masa manfaat atas rehabilitasi aset tetap dalam kebijakan akuntansi, b). pengelolaan pemungutan dan penyeteroran hasil pungutan retribusi jasa layanan pasar Prambanan tidak tertib, diantaranya retribusi yang dipungut tidak segera disetor ke Kas Daerah sebesar Rp.142,043 juta, dan c). Proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metoda pengadaan langsung belum memadai, karena pejabat Pengadaan dan PPKom kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2018.

Hasil penilaian sebagaimana tersebut pada Tabel 3.19. di atas, berdasarkan atas Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan, serta penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

#### **b. Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah**

Kapabilitas APIP ditingkatkan untuk memastikan dan mengurangi terjadinya penyimpangan/penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai melalui sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), adapun pada tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 382 Obyek pemeriksaan, pemeriksaan dengan tujuan khusus/kasus sebanyak 13 Obyek, dan reviu laporan keuangan LKD dan SKPD,

RKA/LKjIP, Pengadaan barang dan jasa, dana desa, Reviu RKPD dan Reviu RPJMD sebanyak 5 laporan. Berdasarkan kinerja pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah mencapai level 2,29 dan Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencapai level 2.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel* terdiri dari 12 (dua belas) program, yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
5. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa;
6. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa/Kelurahan;
8. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
9. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
10. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
11. Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan; dan

12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Permasalahan:**

1. Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan;
2. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur pengawas/auditor; dan
3. Masih adanya ketidaktertiban pengelolaan barang daerah oleh OPD pengelola.

**Solusi :**

1. Penguatan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, koordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditor dalam melaksanakan penyelesaian tindaklanjut pengawasan;
2. Mengajukan formasi auditor dan mengirimkan Diklat Fungsional/Substantif ke Lembaga Diklat yang berkompeten; dan
3. Penguatan komitmen seluruh kepala OPD dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

**7. Sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan;**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Ketentuan peraturan perundangan ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, ditegaskan bahwa ketahanan pangan

merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan persediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pada kenyataannya peta penduduk rawan pangan yang dilansir BPS pada masih menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan. Rendahnya aksesibilitas pangan, dengan indikator kemampuan rumah tangga untuk selalu memenuhi kebutuhan pangan anggotanya akan mendorong penurunan konsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga. Pada akhirnya akan mengancam dan berdampak pada kekurangan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak.

Adapun capaian sasaran Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana Tabel 3.20.

Tabel 3.20.

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja  
Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing  
Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	11,50	11,70	11,70	99,49	12,30	95,12
2	Indeks Kecukupan Pangan	91,4	91,45	91,45	100,00	91,75	99,67
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,5	91,75	91,90	100,16	92,75	99,08
4	Tingkat konsumsi ikan		16,49	18,5	112,19	21,52	85,97
5	Persentase kerusakan hutan dan lahan kritis		16,42	15,76	95,98	14,75	106,08

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran *meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan* di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2017, program yang

dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari 14 (empat belas) program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
3. Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian;
4. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian;
5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
9. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku;
10. Program Pembangunan/Rehab Infrastruktur Sarana Irigasi;
11. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
12. Program Pengembangan Perikanan Tangkal;
13. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; dan
14. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;

**Permasalahan :**

1. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian yang berakibat belum terwujudnya upaya penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan.
2. Belum optimalnya penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas-varietas baru yang memiliki keunggulan absolut

dan komparatif, dan belum optimalnya intensifikasi dan diversifikasi hasil-hasil pangan;

3. Tingginya tingkat penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (back to nature);
4. Belum optimalnya kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual ( intellectual property right ) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten;
5. Belum berkembangnya diversifikasi pangan;
6. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari;
7. Belum tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan;
8. Belum optimalnya sinergitas antara program-program pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran serta keterampilan petani; dan
9. Belum terciptanya sinergitas antar perangkat daerah dalam melakukan koordinasi terpadu dalam upaya mengoptimalkan urusan ketahanan pangan.

**Solusi :**

1. Peningkatan penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian untuk mewujudkan penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
2. Peningkatan penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas-varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan peningkatan intensifikasi dan diversifikasi hasil-hasil pangan;

3. Menekan penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*);
4. Penguatan kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) terhadap produk-produk pangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
5. Penciptaan sinergitas antara program-program pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani.

**8. Sasaran Meningkatnya Dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Penanaman Modal;**

Sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM dan Penanaman Modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Adapun capaian sasaran meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM dan penanaman modal sebagaimana Tabel 3.21.

Tabel 3.21.  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja  
Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai  
Tambah dan Daya Saing Sektor Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi UMKM dan Penanaman Modal**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,76	35,94	103,39	35,5	101,24
2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,86	17,03	90,30	19,55	87,11
3	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	10	10,05	100,50	30	33,50
5	Persentase kenaikan koperasi aktif	%	0,30	3,05	1016,67	0,6	508,33
6	Persentase kenaikan nilai investasi (%):						
	PMDN	%	1,81	73,25	4046,96	2,75	2663,64
	PMA	%	2,40	29,42	1225,75	2,6	1131,54

**a. Persentase UMKM yang memiliki daya saing**

Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 54.981 UMKM, namun dari sebanyak 54.981 UMKM tersebut yang memiliki keunggulan daya saing produk yang kompetitif baru sebanyak 5.526 UMKM (atau 10,05%) yang tersebar di 11 (sebelas) klaster UMKM.

**b. Persentase kenaikan koperasi aktif**

Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 883 koperasi, dan yang dinyatakan koperasi aktif sebanyak 707 koperasi (atau 80,07%) yang tersebar di 26 kecamatan dan koperasi yang tidak aktif sebanyak 176 koperasi (atau 19,93%). Persentase kenaikan koperasi aktif pada tahun 2017 sebesar 3,05% (persentase koperasi aktif sebesar 80,07% dan koperasi aktif pada tahun 2016 sebesar 76,31%).

**c. Persentase kenaikan nilai investasi (%)**

Perkembangan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dlm jutaan Rupiah) pada tahun 2016 tercatat sebanyak Rp.89.209 juta, namun pada tahun 2017 terealisasi sebanyak Rp.333.500 juta atau naik Rp.224.291



juta (naik 73,25%). Begitu juga dengan realisasi PMA, pada tahun 2016 sebanyak 11.279 US\$ pada tahun 2017 terealisasi sebanyak 15.980 US\$ naik 4.701 US\$ (naik 29,42%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Penanaman Modal terdiri dari 11 (sebelas) program, yaitu:

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
3. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
4. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
5. Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan;
6. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
7. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;
8. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
9. Pengembangan Produk Unggulan Wilayah;
10. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan
11. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

**Permasalahan :**

1. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
2. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;

3. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
4. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk-produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten;
5. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL); dan
6. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif.

**Serta:**

1. Belum berkembangnya Produk Unggulan Daerah berbasis Industri Kecil Menengah (IKM);
2. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM di bidang Industri Kecil Menengah;
3. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
4. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;
5. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk;
6. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM;
7. Belum semua IKM mebel memiliki Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK); dan
8. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.

**Solusi :**

1. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
2. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
3. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;

4. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
5. Mengupayakan legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk-produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
6. Penataan dan pemberdayaan PKL.

**Serta:**

1. Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis IKM;
2. Peningkatan profesionalisme SDM di bidang IKM;
3. Penyadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;
4. Pengembangan inovasi dan diversifikasi produk;
5. Penguatan jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM;
6. Fasilitasi IKM mebel agar memiliki SVLK; dan
7. Pengembangan produk berorientasi ekspor.

**9. Sasaran Meningkatnya Produktifitas Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pariwisata;**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;

2. Pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
4. Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pariwisata sebagaimana Tabel 3.22.

Tabel 3.22.  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja  
 Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai  
 Tambah dan Daya Saing Sektor Pariwisata**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	%	3	84,36	2811, 89	10	843,6

*Capaian kinerja* di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pariwisata. Perkembangan jumlah pengunjung pada tahun 2016 tercatat sebanyak 377.731 pengunjung, namun pada tahun 2017 tercatat sebanyak 654.419 pengunjung (naik 73,25%). Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pariwisata terdiri dari 3 (tiga) program, yaitu:

1. Program pengembangan pemasaran pariwisata;
2. Program pengembangan destinasi pariwisata; dan
3. Program pengembangan Kemitraan.

**Permasalahan :**

1. Sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya promosi yang dilakukan, sehingga jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan kecil;
2. Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata masih lemah. Hal ini disebabkan masih rendahnya kualitas produk dan jasa pariwisata, kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek wisata dan daya tarik wisata, masih rendahnya kualitas SDM pengelola obyek wisata dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya;
3. Lemahnya jejaring, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan pariwisata; dan
4. Belum optimalnya sinergitas antara produk pariwisata, produk industri dan UKM unggulan, penyedia jasa, hotel dan restoran.

**Solusi :**

1. Pengembangan promosi untuk peningkatan: jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan;
2. Peningkatan kualitas produk dan jasa pariwisata, sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek wisata dan daya tarik wisata, SDM pengelola obyek wisata dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya;

## 10. Sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan;

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan sebagaimana Tabel 3.23.

Tabel 3.23.

### Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	25,55	22,19	86,85	25,55	86,85
2	Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani	%	81	100	123,46	81	123,46

*Capaian kinerja* sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten. Berdasarkan data capaian indikator Persentase Pencari kerja yang ditempatkan, terdapat sebanyak 2.784 tenaga kerja yang ditempatkan dari sebanyak 7.920 pencari kerja. Sedangkan indikator kasus hubungan pekerja dan perusahaan yang tertangani ada sebanyak 17 kasus yang tersebar di 851 perusahaan. Program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis

Meningkatnya dan Pengembangan Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan terdiri dari 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

**Permasalahan :**

1. Sempitnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh: (i) ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; dan (ii) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah;
2. Peluang kerja yang belum bisa menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
3. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran (pegawai negeri, dll) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa pemerintahan;
4. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
5. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan angkatan kerja baru, tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia;

6. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
7. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;
8. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak-hak pekerja;
9. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
10. Inkonsistensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI); dan
11. Belum tersedianya database ketenagakerjaan.

**Solusi :**

1. Membuka peluang kerja seluas-luasnya untuk menampung tenaga kerja bagi pencari kerja;
2. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa pemerintahan;
3. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya keterampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
4. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif;



5. Mengoptimalkan pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;
6. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak-hak pekerja;
7. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja; dan
8. Merintis database ketenagakerjaan secara online.

**11. Sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi;**

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 selama tahun 2013-2016 menunjukkan kinerja positif. Tahun 2013 sebesar Rp.23.345.149,84 juta (tumbuh 9,35%), tahun 2014 sebesar Rp.26.270.890,31 juta (tumbuh 12,53%), pada tahun 2015 sebesar Rp.28.988.778,55 juta (tumbuh 10,35%) dan tahun 2016 sebesar Rp.31.558.691,06 juta (tumbuh 8,87 %).

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah ditunjang adanya pengembangan ekonomi kreatif dan produktif dengan menerapkan produk-produk inovasi daerah. Upaya yang ditempuh dengan menggerakkan masyarakat lewat hasil inovasi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna. Adapun capaian sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi sebagaimana Tabel 3.24.

Tabel 3.24.

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase hasil inovasi masyarakat/hasil krenova/TTG yang dikembangkan	%	5	2,5	50,00	20	12,5

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Penerapan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Klaten, yang ditunjang capaian indikator persentase hasil inovasi masyarakat/hasil krenova/TTG yang dikembangkan dari sebanyak 30 hasil inovasi masyarakat dan yang dikembangkan sebanyak 2 produk, yakni prototipe *hand tracktor* dan perbaikan varietas beras Rojolele, Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatkan Penerapan Inovasi Dalam Pengembangan Ekonomi ditunjang dengan program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan.

**Permasalahan :**

1. Belum optimalnya perencanaan berbasis hilirisasi hasil kreatifitas dan inovasi masyarakat; dan
2. Masih rendahnya pemihakan kebijakan dan penganggaran untuk pengembangan produk pengembangan daerah.

**Solusi :**

Adanya skala prioritas penerapan hasil kreatifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.

**12. Sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Sementara ini kewajiban yang harus diperhatikan terkait prasarana jalan adalah: Total panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk ke dalam kategori jalan negara 45,272 Km, jalan provinsi sepanjang 34,238 Km dan jalan kabupaten sepanjang 769,63 Km. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan adalah aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 1.608 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Disamping itu pemerintah kabupaten diwajibkan pula serius untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat.

Adapun capaian sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana Tabel 3.25.

Tabel 3.25.

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	%	56,92	61,15	107,43	65,8	92,93
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	61,75	81,32	131,69	63,00	129,08
3	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	%	61,82	52,63	85,13	63,24	83,22
4	Persentase irigasi dalam kondisi baik (%)	%	19,122	22,04	115,26	19,130	115,21
5	Rasio tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,066	0,172	260,61	0,074	232,04
6	Persentase pengoperasian TPA (%)	%	26	33,33	128,19	46	72,46
7	Tingkat keselamatan lalu lintas	%	90	99,77	110,86	94	106,14

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Kabupaten Klaten, dengan penjelasan sebagai berikut:

**a. Persentase jalan dalam kondisi baik (%)**

Indikator persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 61,15% dari total jalan dalam kondisi baik tahun 2017 sepanjang 470,61 Km, dari total panjang jalan 769,63 Km. Atau naik 4,90% dibanding tahun 2016 (jalan dalam kondisi baik sepanjang 432,92 Km).

**b. Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)**

Indikator persentase jembatan dalam kondisi baik sebanyak 283 atau sebesar 81,32% dari total jembatan 348.

**c. Persentase drainase dalam kondisi baik (%)**

Indikator persentase drainase dalam kondisi baik sepanjang 87,35 Km atau sebesar 52,63% dari total drainase sepanjang 165,96 Km.

**d. Persentase irigasi dalam kondisi baik (%)**

Indikator persentase irigasi dalam kondisi baik sebesar 22,04% dari total luasan jaringan irigasi dalam kondisi baik sebanyak 7.208 ha, dan total luasan jaringan 32.704 ha.

**e. Rasio tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)**

Indikator rasio tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2017 sebesar 0,172% dihitung dari jumlah TPS sebanyak 224 unit dibagi jumlah penduduk pada tahun berkenaan (jumlah penduduk sebanyak 1.486.426 jiwa) dikalikan 1000.

**f. Persentase pengoperasian TPA (%)**

Indikator persentase pengoperasian TPA pada tahun 2017 sebesar 33,33% dihitung dari jumlah TPA yang beroperasi sebanyak 1 lokasi (TPA Candirejo) dibagi jumlah

TPA sebanyak 3 lokasi (TPA Joho, TPA Troketon, dan TPA Candirejo).

**g. Tingkat keselamatan lalu lintas**

Indikator tingkat keselamatan lalu lintas pada tahun 2017 sebesar 99,77% dihitung dari bobot angka kecelakaan ***dibagi*** jumlah penduduk ***dikalikan*** 100%. Bobot angka kecelakaan sebesar 14.898,53 dan jumlah penduduk sebanyak 1.486.426 jiwa.

Pada tahun 2017 program yang dilaksanakan untuk sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terdiri dari 21 (dua puluh satu) program, yaitu:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong;
3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan;
4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
7. Program Pengendalian Banjir;
8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
10. Program Penataan Trotoar;
11. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
12. Program Pengembangan Perumahan;
13. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
15. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

16. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
17. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
18. Program peningkatan pelayanan angkutan;
19. 'Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas; dan
20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

**Permasalahan :**

1. Infrastruktur jalan dan jembatan banyak dalam kondisi rusak, sebagai akibat minimnya pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
2. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
3. Belum optimalnya fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
4. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
5. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM; dan
6. Belum optimalnya kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

**Solusi :**

1. Peningkatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan;

2. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
3. Optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
4. Optimalisasi kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
5. Sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM untuk mengawasi pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah secara ketat; dan
6. Peningkatan kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

### **13. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman;**

Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurus masalah administrasi pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat.

Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pembatasan

kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan. Sementara ini tercatat sebanyak 324.167 unit rumah.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman sebagaimana Tabel 3.26.

Tabel 3.26.

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja  
Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan  
Perumahan dan Pemukiman**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase air minum layak	87,2	90,4	84,74	93,74	100	84,74
2	Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak	88,22	93	90,80	97,63	100	90,80
3	Rasio luasan kawasan kumuh perkotaan	50,00	52	1,18	2,27	57	2,07
4	<i>Rasio cakupan elektrifikasi</i>		96	95	98,96	100	95,00
5	Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan	5,48	9,25	1,41	15,24	11,5	12,26
6	Persentase penanganan RTLH	13,73	12,57	9,60	76,37	34,25	28,03

*Capaian kinerja* di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Klaten dengan penjelasan sebagai berikut:

**a. Persentase air minum layak**

Indikator Persentase air minum layak pada tahun 2017 sebesar 84,74% dihitung dari jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 1.145.816 Rumah Tangga (RT) **dibagi** jumlah total rumah tangga sebanyak 1.352.155 RT.



**b. Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak**

Indikator Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak pada tahun 2017 sebesar 90,80% dihitung dari jumlah rumah tangga yang bersanitasi dengan sistem air limbah yang layak sebanyak 1.227.757 unit *dibagi* jumlah jumlah total rumah tangga 1.352.155 RT.

**c. Rasio luasan kawasan kumuh perkotaan**

Indikator rasio luasan kawasan kumuh perkotaan pada tahun 2017 sebesar 1,18% dihitung dari luasan kawasan kumuh perkotaan yang tertangani sebanyak 236,50 ha *dibagi* jumlah luasan kawasan perkotaan sebanyak 20.018 ha dikali seratus persen.

**d. Rasio cakupan elektrifikasi**

Indikator rasio cakupan elektrifikasi pada tahun 2017 sebesar 95% dihitung dari jumlah rumah tangga pengguna listrik sebanyak 378.661 RT *dibagi* jumlah rumah tangga sebanyak 398.591 RT.

**e. Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan**

Indikator Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan pada tahun 2017 sebesar 1,41% dihitung dari luasan ruang terbuka hijau sebanyak 282 ha *dibagi* luasan kawasan perkotaan sebanyak 20.018 ha.

**f. Persentase penanganan RTLH**

Indikator Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2017 sebesar 9,60% dihitung dari jumlah RTLH yang tertangani sebanyak 2.378 unit *dibagi* jumlah RTLH berdasarkan PBDT sebanyak 24.775 unit.

Pada tahun 2017 program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman terdiri dari 3 (tiga) program, yaitu:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
2. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

**Permasalahan :**

1. Banyaknya rumah tidak layak huni, dan merata di setiap kecamatan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat;
3. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
4. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum); dan
5. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.

**Solusi :**

1. Percepatan penanganan pembangunan rumah tidak layak huni;
2. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum) layak melalui pelaksanaan Program Kotaku; dan
4. Percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan mengerakkan partisipasi masyarakat lewat Corporate Social Responsibility (CSR).

## 14. Sasaran Pengendalian dan Penurunan Tingkat Kerusakan Lingkungan Hidup;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlunya pengaturan yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 1 butir 10 UU PPLH).

Sehingga potensi dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan dapat diantisipasi.

Berbagai hal tersebut di atas, perlu ada upaya pengurangan kerentanan resiko bencana dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk upaya tersebut perlunya penguatan masyarakat dengan menciptakan desa tangguh bencana dengan berbagai instrumen yang diperlukan.

Adapun capaian sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana sebagaimana Tabel 3.27.

Tabel 3.27.

### Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pengendalian dan Penurunan Tingkat Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Status udara		29	83,3	287,24	25	333,20
2	Status air		39	18,28	63,04	35	52,23
3	Lahan tutupan		29	42,54	146,69	25	170,16

*Capaian kinerja* sasaran strategis pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup sebagaimana Tabel 3.27. di atas merupakan hasil dari sebagai upaya untuk meningkatkan dan antisipasi: mengurangi resiko perubahan iklim, mengurangi kerusakan, kemerosotan atau kepunahan, keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Pada tahun 2017 program yang dilaksanakan untuk sasaran pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup terdiri dari 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup;
4. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); dan
5. Program pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.

**Permasalahan :**

1. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menurunnya kualitas RTH kota seperti taman-taman kota dan lainnya;
2. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan;
3. Terbatasnya lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;

4. Meningkatnya produksi sampah serta sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu;
5. Peningkatan pencemaran air dan udara serta tingkat kebisingan;
6. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
7. Banyaknya kegiatan industri atau kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan
8. Banyaknya perusahaan/kegiatan industri yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

#### **Solusi**

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas RTH;
2. Peningkatan penegakan hukum di bidang lingkungan;
3. Optimalisasi TPA;
4. Pengendalian pencemaran air dan udara serta tingkat kebisingan;
5. Akseklarasasi penyediaan dokumen lingkungan AMDAL, UKL, UPL, SPPL bagi kegiatan industri atau kegiatan usaha; dan
6. Penekanan bagi perusahaan/kegiatan industri untuk memiliki IPAL.

### **15. Sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana;**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Setiap orang berhak mendapatkan

pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya dan melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Selain itu setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Berbagai hal tersebut di atas, perlu ada upaya pengurangan kerentanan resiko bencana dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk upaya tersebut perlunya penguatan masyarakat dengan menciptakan desa tangguh bencana dengan berbagai instrumen yang diperlukan.

Adapun capaian sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana sebagaimana Tabel 3.28.

Tabel 3.28.

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa)	0	1	3	300	15	20

Pada tahun 2016 upaya untuk mewujudkan desa tangguh bencana belum ditargetkan, baru tahun 2017 ditargetkan adanya Desa Tangguh Bencana dan terwujud di tiga desa, yakni: 1) Desa Ngandong Kecamatan Gantiwarno, 2) Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang, dan 3) Desa Bawak Kecamatan Cawas (kenaikan status desa tangguh bencana sebanyak 3 desa). Serta untuk mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Resiko Bencana di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan terdiri dari 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
3. Program Peningkatan Pengelolaan logistik; dan
4. Program Penanganan Darurat Bencana.

**Permasalahan :**

1. Masih rendahnya perencanaan berbasis mitigasi bencana; dan
2. Sulitnya persyaratan dan dukungan pembiayaan desa tangguh bencana.

**Solusi :**

1. Mendorong dan penguatan kelembagaan perencanaan berbasis mitigasi bencana secara terpadu; dan
2. Peningkatan dan pemihakan kebijakan desa tangguh bencana secara massif.

**16. Sasaran Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;**

Peningkatan efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan

hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar rencana. Kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP) yang disusun harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Sehingga sebagai konsekuensi logis dari persoalan tersebut, KRP harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pemanfaatan dan pengendalian ruang merupakan upaya yang terstruktur, dan sebagai terobosan dan memastikan bahwa pada setiap tahap awal penyusunan KRP sudah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Adapun capaian sasaran Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sebagaimana Tabel 3.29.

Tabel 3.29.

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	91	65	<b>71,43</b>	95	68,42

*Capaian kinerja* di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang terdiri dari 2(dua) program, yaitu:

1. Program Perencanaan Tata Ruang; dan



## 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

### **Permasalahan :**

1. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
3. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara konsisten, hal ini disebabkan karena belum lengkapnya piranti peraturan penunjang;
4. Belum kuatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif-desinsentif serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
5. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di bidang RTRW; dan
6. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

### **Solusi :**

1. Optimalisasi Kinerja BKPRD dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
3. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara konsisten dan tidak tebang pilih; dan

4. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian *insentif-desinsentif* serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

**17. Sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Bagi Masyarakat;**

Memperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56 km<sup>2</sup>) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk sudah mencapai kisaran angka 2,49 dan cakupan penegakan Perda baru mencapai 90,91 hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Bagi Masyarakat sebagaimana Tabel 3.30.

Tabel 3.30.

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja  
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Bagi Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Angka kriminalitas	2,84	2,82	3,25	115,25	2,77	117,33
2	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial	40,78	42,78	35,52	83,03	46,78	75,93

Angka kriminalitas dari tahun ke tahun dapat ditekan karena dukungan masyarakat. Namun masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh

bantuan sosial belum bisa memenuhi target karena keterbatasan pembiayaan dari 119.489 PMKS baru bisa ditangani sebanyak 48.729 PMKS. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Bagi Masyarakat terdiri dari 8(delapan) program, yaitu:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
2. Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik;
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);
6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan
8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

**Permasalahan:**

1. Masih munculnya berbagai penyakit masyarakat;
2. Adanya ancaman pergerakan terorisme yang berkembang di Klaten;
3. Masih rendahnya kualitas pembinaan aparatur penanggulangan bencana alam dan rendahnya manajemen penanganan bencana; dan
4. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat.

**Solusi :**

1. Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai penyakit masyarakat;

2. Peningkatan kualitas pembinaan aparatur penanggulangan bencana alam dan manajemen penanganan bencana; dan
3. Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.

### 18. Sasaran Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah;

Cakupan penegakan Perda pada tahun 2017 mencapai 92,20 sekalipun luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusifitas daerah.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana Tabel 3.31.

Tabel 3.31.

#### **Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase penegakan Peraturan Daerah		91,25	92,2	101,04	92	100,22
2	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	401	401	401	100,00	401	100

*Capaian kinerja* meningkatnya penegakan Perda diukur dengan indikator persentase penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2017 tercatat sebanyak 605 Perda dari 656 Perda. Sedangkan program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Bagi Masyarakat terdiri dari 8 (delapan) program, yaitu:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

2. Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik;
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat);
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan
8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

**Permasalahan:**

1. Masih munculnya berbagai penyakit masyarakat;
2. Adanya ancaman pergerakan terorisme yang berkembang di Klaten;
3. Masih rendahnya kualitas pembinaan aparatur penanggulangan bencana alam dan rendahnya manajemen penanganan bencana; dan
4. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat.

**Solusi :**

1. Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai penyakit masyarakat;
2. Peningkatan kualitas pembinaan aparatur penanggulangan bencana alam dan manajemen penanganan bencana; dan
3. Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.

## **19. Sasaran Peningkatan Kerukunan Intern dan Antar Umat Beragama;**

Berdasarkan kondisi luas wilayah 65.556 ha (655,56 km<sup>2</sup>) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan jumlah tempat ibadah sebanyak 4.479 buah (Masjid dan Musholla sebanyak 4.278 buah, Gereja Kristen sebanyak 140 buah, Gereja Katolik sebanyak 11 buah, Pura sebanyak 43 buah, serta Vihara sebanyak 7 buah) dan jumlah penduduk yang menganut agama: Islam sebanyak 1.397.272 jiwa (atau 94%), Katolik sebanyak 45.747 jiwa (atau 3,08%), Kristen sebanyak 36.681 jiwa (2,47%), Hindu sebanyak 5.687 jiwa (atau 0,38%), Buddha sebanyak 339 jiwa (atau 0,02%), Kong Hu Cu sebanyak 37 jiwa (atau 0,002%) dan aliran kepercayaan sebanyak 663 jiwa (atau 0,04%). Sehingga perlu untuk menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama dalam menjaga kondusifitas daerah sangat diperlukan.

Adapun capaian sasaran Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama sebagaimana Tabel 3.32.

Tabel 3.32.

### **Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Peningkatan Kerukunan Intern dan Antar Umat Beragama**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		29,6	30,13	101,79	28,48	105,79
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama		75	85	113,33	75	113,33

Capaian kinerja sasaran strategis Peningkatan Kerukunan Intern dan Antar Umat Beragama diukur dari Rasio tempat ibadah per satuan penduduk pada tahun 2017 dihitung berdasarkan jumlah tempat ibadah sebanyak 4.479 buah dibagi jumlah penduduk sebanyak 1.486.426 jiwa dikalikan 1000 didapat rasio sebesar 30,13%. Sedangkan Persentase peningkatan penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama, dihitung dari jumlah penyelenggaraan forum kerukunan umat beragama pada tahun 2016 sebanyak 125 kali kegiatan dan pada tahun 2017 sebanyak 156 kali kegiatan (atau naik 85%). Pada tahun 2017 program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran Peningkatan Kerukunan Intern dan Antar Umat Beragama terdiri dari 3 (tiga) program, yaitu:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
2. Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik; dan
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

**Permasalahan:**

1. Masih adanya paham radikalisme yang akan menjadi ancaman terciptanya kondusifitas daerah; dan
2. Tingginya mobilitas penduduk dan masih rendahnya kualitas politik masyarakat akan menjadi ancaman keamanan dan kenyamanan lingkungan;

**Solusi :**

1. Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai paham yang mengakibatkan ancaman toleransi keberagaman masyarakat;
2. Peningkatan kualitas pembinaan intern dan antar umat beragama; dan
3. Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.

## 20. Sasaran Perempuan Dalam Pembangunan;

Perlindungan anak merupakan salah satu agenda penting dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, mengingat jumlah anak di Kabupaten Klaten telah mencapai 411.599 jiwa (atau 31,40% dari total jumlah penduduk). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak dengan cara penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak. Data menunjukkan 14,47 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok sangat rawan pangan (asupan kalori <1.400 Kkal/orang/hari), 5,38 persen prevalensi gizi kurang hal ini menunjukkan bahwa *foodborne disease* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi.

Kondisi umum pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perlindungan anak di Kabupaten Klaten, diantaranya terkait: (1). Penguatan kelembagaan, (2). Hak sipil dan kebebasan, (3). Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4). Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kreatif, serta (6). Perlindungan khusus.

Adapun capaian sasaran perempuan dalam pembangunan sebagaimana Tabel 3.33.



Tabel 3.33.  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja  
Peningkatan Perempuan Dalam Pembangunan**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Rasio perempuan korban kekerasan		1,5	0,25	16,67	1,3	19,23
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		53,96	21,03	38,97	54	38,94
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta		77,5	59,99	77,41	87,50	68,56
4	Drop out akseptor KB		17	14	82,35	13	107,69
5	Laju pertumbuhan penduduk		1,05	1,03	98,10	0,95	108,42

**a. Rasio perempuan korban kekerasan**

Rasio perempuan korban kekerasan pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,25 dihitung dari Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu sebanyak 17 dibagi Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu sebanyak 68 kasus.

**b. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**

Berdasarkan Pemilu Legislatif tahun 2014 diukur dari tingkat kehadiran jumlah perempuan yang hadir sebanyak 52,45% (atau sebanyak 400.247 jiwa dari total jumlah yang hadir sebanyak 763.094 jiwa), namun jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD hanya sebanyak 3 orang (atau 6 % dari 50 anggota DPRD). Sedang jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah sebanyak 54,48% (atau sebanyak 7.072 ASN dari total jumlah ASN sebanyak 12.980 jiwa). Persentase Capaian kinerja partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2017 sebesar 21,03%.

**c. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta**

Jumlah perempuan yang berkerja di lembaga swasta tercatat sebanyak 76.625 orang (atau 59,99% dari total jumlah penduduk yang bekerja di sektor swasta sebanyak 127.730 orang).

**d. Drop out akseptor KB**

Persentase Drop out akseptor KB pada tahun 2017 tercatat sebesar 14% berdasarkan catatan kinerja jumlah akseptor KB baru sebanyak 26.481 orang, KB Aktif sebanyak 189.150 orang dan persentase Peserta Aktif (PA) - Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 78,70%.

**e. Laju pertumbuhan penduduk**

Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2016 sebesar 0,41% (atau bertambah sebanyak 6.155 jiwa), dan tahun 2017 sebesar 1,03% (atau bertambah 15.310 jiwa dari sebanyak 1.486.426 jiwa pada tahun 2016).

*Capaian kinerja* di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Peningkatan Perempuan Dalam Pembangunan, dan pada tahun 2017 program yang dilaksanakan untuk sasaran Peningkatan Perempuan Dalam Pembangunan, yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Program Pelayanan Kontrasepsi;
4. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri;
5. Program Peningkatan Peran serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
6. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat;

7. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
8. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; dan
9. Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

**Permasalahan :**

1. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak;
2. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
3. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
4. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

**Solusi :**

1. Peningkatan kebijakan pembangunan yang berspektif perempuan dan anak;
2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
3. Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
4. Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak.

## **21. Sasaran Peningkatan Pemenuhan Hak Anak;**

Perlindungan anak merupakan salah satu agenda penting dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, mengingat jumlah anak di Kabupaten Klaten pada tahun 2017 sebanyak 368.095 jiwa (atau 24,76% dari total jumlah penduduk). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan

masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak dengan cara penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak.

(BPS, 2016) Jumlah penduduk Indonesia yang rawan pangan sebesar 14,47 persen dan 5,38 persen prevalensi gizi buruk. Disamping itu, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tercemar (*foodborne disease*) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi.

Kondisi umum pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perlindungan anak di Kabupaten Klaten, diantaranya terkait: (1). Penguatan kelembagaan, (2). Hak sipil dan kebebasan, (3). Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4). Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kreatif, serta (6). Perlindungan khusus.

Adapun capaian sasaran Peningkatan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana Tabel 3.34.

Tabel 3.34.

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Peningkatan Pemenuhan Hak Anak**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	5,21	4,7	3,29	70	4,3	76,51

Jumlah anak di Kabupaten Klaten pada tahun 2017 tercatat sebanyak 368.095 anak. Dari sebanyak 368.095 anak tersebut yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 12.110 anak (atau 3,29%), dari bentuk-bentuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang bekerja di bawah umur, dan penyandang disabilitas.

*Capaian kinerja* di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Peningkatan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran Peningkatan Pemenuhan Hak Anak yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
4. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat; dan
5. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.

**Permasalahan :**

1. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak;
2. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
3. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
4. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

**Solusi :**

1. Peningkatan kebijakan pembangunan yang berspektif perempuan dan anak;
2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
3. Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
4. Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak.

## 22. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat;

Ukuran keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diantaranya diukur pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 992.889 jiwa penduduk yang wajib KTP.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat sebagaimana Tabel 3.35.

Tabel 3.35.

### Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Kondisi Tahun 2017			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2017 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase alih fungsi lahan tanah pertanian menjadi non pertanian		0,1650	0,1359	82,36	0,1610	84,41
3	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	89,38	91	92,76	101,93	98	94,65
2	Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk	16,68	28,56	84,95	297,44	36,08	235,45
4	Persentase peningkatan minat transmigrasi		35	63,86	182,46	55	116,11

#### a. Persentase alih fungsi lahan tanah pertanian menjadi non pertanian

Luasan lahan pertanian pada tahun 2016 sebanyak 33.111 ha, dan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 33.066 ha atau persentase alih fungsi lahan tanah pertanian menjadi non pertanian sebesar 0,1359% (atau berkurang sebanyak 45 ha).

#### b. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada tahun 2017 sebesar 92,76% dengan perhitungan jumlah

penduduk yang ber-KTP sebanyak 928.129 jiwa ***dibagi*** jumlah penduduk wajib ber-KTP sebanyak 1.000.575 jiwa ***dikalikan*** 100%

**c. Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk**

Pada tahun 2017 tercatat sebanyak jumlah penduduk telah memiliki akta kelahiran sebanyak 1.108.189 jiwa. Dengan perhitungan jumlah penduduk yang ber-akta sebanyak 1.108.189 jiwa ***dibagi*** jumlah penduduk sebanyak 1.304.519 jiwa (sumber: Disdukcapil Tahun 2018 berdasarkan administrasi database) ***dikalikan*** 100%.

**d. Persentase peningkatan minat transmigrasi**

Minat Transmigrasi pada tahun 2016 sebanyak 30 jiwa, dan tahun 2017 menjadi sebanyak 83 jiwa (atau bertambah 53 jiwa pada tahun 2017). Apabila dihitung pada tahun 2017 naik sebesar 63,86%.

*Capaian kinerja* di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Menigkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran Menigkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat terdiri dari 1(satu) program, yaitu:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
2. Program Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Dikendalikan Oleh Badan Pertanahan.

**Permasalahan :**

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan;
2. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait; dan

3. Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

**Solusi :**

1. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan administrasi kependudukan; dan
2. Peningkatan sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

---

### **3.3 Akuntabilitas Anggaran**

Kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah pada tahun 2016 sebanyak Rp.2.174.550.555.820,- (*dua trilyun seratus tujuh puluh empat milyar lima ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah*), dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebanyak Rp.2.581.300.169.837,- (*dua trilyun lima ratus delapan satu milyar tiga ratus juta seratus enam puluh sembilan delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

##### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 sebanyak Rp.203.699.708.000,- (*dua ratus tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah*), dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebanyak Rp.371.503.313.226,- (*tiga ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus tiga juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*).



**b. Dana Perimbangan/Transfer**

Dana Perimbangan pada tahun 2016 sebanyak Rp.1.482.193.569.820,- (*satu trilyun empat ratus delapan puluh dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*), dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.1.851.429.999.039,- (*satu trilyun delapan ratus lima puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah*).

**c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah pada tahun 2016 sebanyak Rp.488.657.278.000,- (*empat ratus delapan puluh delapan milyar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*), sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi Rp.358.367.257.572,- (*tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah*).

**2. Belanja Daerah**

Mengingat potensi pendapatan dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, namun Belanja Daerah pada tahun 2016 sebanyak Rp. 2.567.449.419.713,- (*dua trilyun lima ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*), dan pada tahun 2017 menurun menjadi Rp.2.482.125.690.218,- (*dua trilyun empat ratus delapan puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

**a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2016 sebanyak Rp.1.973.414.595.859,- (*satu trilyun sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*), dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.2.106.956.415.830,- (*dua trilyun seratus enam milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*).

**b. Belanja Langsung**

Belanja Langsung (mendanaikan program dan kegiatan) pada tahun 2016 sebanyak Rp.594.034.823.854,- (*lima ratus delapan puluh empat milyar tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*), dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.365.199.198.151,- (*tiga ratus enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah*).

Untuk menjaga keseimbangan sistem penganggaran daerah langkah yang diperlukan adalah menyusun kebijakan daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2016 sebesar Rp.67.050.151.400,- (*enam puluh tujuh milyar lima puluh juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah*) dan tahun 2017 menjadi Rp.375.166.439.262,- (*tiga ratus tujuh puluh lima milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*).
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.8.200.000.000,- (*delapan milyar dua ratus juta rupiah*) dan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp.18.200.000.000,- (*delapan belas milyar dua ratus juta rupiah*).

Tabel 3.36.  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Kinerja					Anggaran		
		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1	Sasaran terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka	92,39	78,17	85	8.608.300.000	16.098.097.445	56,27
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Angka	95,03	79,5	103			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Angka	88,08	90,93	103			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Angka	82,10	86,84	106			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Angka	64,44	68,22	103			
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Angka	96,65	88,28	91			
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka	0,02	0,04	200			
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka	0,10	0,23	230			
		Angka kelulusan SD/MI	Angka	97,79	98,27	100,5			
		Angka kelulusan SMP/ MTs	Angka	95,56	98,11	103			
	Persentase Kenaikan kunjungan perpustakaan	%	6,75	1,24	18,44				
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	Persentase balita gizi buruk	%	0,74	0,73	98,65	100.048.452.000	87.511.470.177	87,47
		Angka kematian ibu melahirkan	Kasus	14	18	128,57			
		Angka kematian bayi	Angka	12	10,15	84,58			
		Angka kematian balita	Angka	15,8	1,69	10,70			
3	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya	Persentase kenaikan peserta festival seni dan budaya	%	55	155	281,82	265.000.000	260.784.875	83,59
		Persentase kenaikan kunjungan taman budaya	%	5	0	0,00			
4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Tingkat prestasi pemuda	%	47	50	106,38	2.160.000.000	1.933.437.145	89,51
		Tingkat prestasi olahraga	%	36	73	202,78			
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Persentase konsistensi perencanaan	%	74	77	104,05	10.651.030.000	8.278.960.759	77,73
		Persentase penggunaan data statistik	%	92	27,2	29,57			
		Persentase pengelolaan arsip secara baku	%	3,61	5,62	155,62			
		Persentase sistem berbasis informasi	%	15	0,34	2,27			
		Persentase pengamanan informasi persandian	%	62	27	43,55			
		Skor LPPD	Skor	2,73	2,98	109,16			
		Indeks profesionalitas ASN	Indeks	83	83,21	100,25			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Kinerja				Anggaran			
		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
		Skor LKjIP	Skor	62	53,01	85,5			
		Opini Kemenkeu terhadap kapasitas fiskal daerah	opini	0,21-0,3	1,2	400			
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WDP	75	47.858.958.000	36.595.117.383	76,46
		Tingkat Muturitas SPIP	Tingkat	2	2,79	139,50			
		Tingkat Kapabilitas APIP	Tingkat	2	2	100,00			
7	Meningkatnya Produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	%	11,76	11,70	99,49	17.555.000.000	15.376.967.586	87,59
		Indeks Kecukupan Pangan	Indeks	91,45	91,45	100,00			
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,75	91,90	100,16			
		Tingkat konsumsi ikan	%	16,49	18,5	112,19			
		Persentase kerusakan hutan dan lahan kritis	%	16,42	15,76	95,98			
8	Meningkatnya dan pengembangan Produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM dan penanaman modal	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,76	35,94	103,39	23.745.236.000	14.879.506.595	62,66
		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,86	17,03	90,30			
		Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	10	10,05	100,50			
		Persentase kenaikan koperasi aktif	%	0,30	3,76	1253,33			
		Persentase kenaikan nilai investasi (%) :							
		PMDN	%	1,81	73,25	4046,96			
		PMA	%	2,40	29,42	1225,75			
9	Meningkatnya Produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	%	3	84,36	2811, 89	12.160.000.000	2.367.541.629	19,47
10	Meningkatnya dan pengembangan Produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	25,55	22,19	86,85	760.000.000	636.632.299	83,77
		Persentase kasus penyelesaian hubungan pekerja dan perusahaan tertangani	%	81	100	123,46			
11	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pengembangan ekonomi	Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan	%	5	2,5	50,00	458.870.000	274.492.600	59,82
12	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	%	56,92	61,15	107,43	357.137.370.000	264.869.973.464	74,16
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	61,75	81,32	131,69			
		Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	%	61,82	52,63	85,13			
		Persentase irigasi dalam kondisi baik (%) (luasan irigasi dalam kondisi baik)	%	58,45 19.112	22,04 7.208	37,71 37,71			
		Rasio tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,066	0,172	260,61			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Kinerja				Anggaran			
		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
		Persentase pengoperasian TPA (%)	%	26	33,33	128,19			
		Tingkat keselamatan lalu lintas	%	90	99,77	110,86			
13	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan pemukiman	Persentase air minum layak	%	90,4	84,74	93,74	41.035.000.000	36.705.223.308	89,45
		Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak	%	93	90,80	97,63			
		Rasio luasan kawasan kumuh perkotaan	%	52	1,18	2,27			
		Rasio cakupan elektrifikasi	%	96	95	98,96			
		Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan	%	9,25	1,41	15,24			
		Persentase penanganan RTLH	%	12,57	9,60	76,37			
14	Peningkatan pengendalian dan penurunan kerusakan lingkungan hidup	Status udara	indeks	29	83,3	287,24	1.775.000.000	1.396.300.151	78,66
		Status air	indeks	39	18,28	63,04			
		Lahan tutupan		29	42,54	146,69			
15	Terwujudnya pengukuran kerentanan resiko bencana	Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa)	%	1	3	300,00	2.605.546.000	1.786.048.551	68,55
16	Terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	91	65	71,43	515.000.000	312.372.950	60,65
17	Meningkatnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat	Angka kriminalitas	Angka	2,82	3,25	115,25	10.137.131.000	8.961.761.870	88,41
		Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	42,78	35,52	83,03			
18	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	Persentase penegakan Peraturan Daerah	%	91,25	92,2	101,04	3.611.994.000	2.945.532.475	81,55
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	ds/kel	401	401	100,00			
19	Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	29,6	30,3	102,37	4.071.987.000	3.027.181.048	74,34
		Persentase peningkatan penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama	%	75	85	113,33			
20	Peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan	Rasio perempuan korban kekerasan	%	1,5	0,25	16,67	2.925.850.000	2.385.169.543	81,52
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	53,96	21,03	38,97			
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	77,5	59,99	77,41			
		Drop out akseptor KB	%	17	14	82,35			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Kinerja				Anggaran			
		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
		Laju pertumbuhan penduduk	%	1,05	1,03	98,10			
21	Peningkatan pemenuhan hak anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	4,7	3,29	70,00	114.000.000	83.254.000	73,03
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Persentase alih fungsi lahan tanah pertanian menjadi non pertanian	%	0,1650	0,1359	82,36	2.775.359.000	2.471.815.218	89,06
		Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	91	92,76	101,93			
		Rasio penduduk ber akta kelahiran per satuan penduduk	%	28,56	84,95	297,44			
		Persentase peningkatan minat transmigrasi	%	35	63,86	182,46			
<b>J u m l a h</b>							650.975.083.000	509.157.641.071	78,21
<b>Jumlah Belanja Pendukung</b>									
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>									

---

### 3.4 Efektifitas Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) sasaran strategis dengan sebanyak 48 (empat puluh delapan) indikator kinerja sasaran, dan didukung sebanyak 107 program. Serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 ditetapkan sebanyak 22 (dua puluh dua) sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan). Selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Klaten dengan didukung sebanyak 140 Program.

Begitu pula untuk mengefektifkan pelaksanaan program pembangunan daerah ditetapkan pula APBD Tahun 2016 dengan didukung sebanyak 187 Program. Pelaksanaan program APBD berhasil menekan efisiensi belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp.96.152.271.676,- (atau 16,19%) dari total belanja langsung yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah mampu menekan efisiensi, yakni tercapainya target yang telah ditetapkan dengan menyisakan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program utama sebesar Rp. 54.170.763.646,- (atau 18,44%), dan efisiensi untuk program pendukung sebesar Rp. 41.981.508.030,- (atau 13,98%)



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sehingga LKjIP Kabupaten Klaten Tahun 2017 secara umum merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintah berazaskan: tanggung jawab negara, kesinambungan dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

**Berdasarkan hasil pengukuran kinerja** terhadap 22 (dua puluh dua) sasaran strategis dengan 48 (empat puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) indikator yang sifatnya progresif, dan 10 (sepuluh) indikator yang sifatnya refresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

- a. **Indikator Progresif**, dengan hasil: a. Sebanyak 46 (empat enam) Indikator Kinerja sasaran atau sebanyak 58,23% dengan kriteria **Sangat Baik**, b. Sebanyak 11 (sebelas) atau sebanyak 13,92 % dengan kriteria **Tinggi**, c. Sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja



Sasaran atau sebanyak 5,06% dengan kreteria Sedang. d. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,27 % belum bisa dikreteria karena belum ada data, dan e. Sebanyak 8 (delapan) atau sebanyak 10,13 % dengan kreteria Sangat Rendah.

- b. **Indikator Represif**, dengan hasil: a. Sebanyak 6 (enam) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 60 % dengan kreteria Baik (Berhasil Menekan), b. Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 40 % dengan kreteria Tidak Baik (Melampaui Target yang ditetapkan).

#### 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Memedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, hasil LKjIP tahun berkenaan dipakai sebagai bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program terkait dengan: (a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah), dan (b) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2017 diucapkan terima kasih, dengan harapan semoga mampu mewujudkan **Visi Daerah: Maju, Mandiri dan Berdaya Saing**.

Klaten, Maret 2018

BUPATI KLATEN



HI. SRIMULYANI

# LAMPIRAN I

## Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten Tahun 2017

1. Sertifikat Penghargaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Dinas Peternakan Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Pelaksana Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Berprestasi;
2. Penghargaan Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Klaten sebagai Juara Harapan II dalam Pelaksanaan Lomba Cipta Menu Pangan Olahan Berbahan Baku Lokal Tahun 2017;
3. Penghargaan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2017 Kategori Madya;
4. Penghargaan Gubernur Jawa Tengah kepada PT. Mondrian Klaten sebagai Juara I Kategori Perusahaan Kecil Menengah Eksportir Tangguh Jawa Tengah Tahun 2017;
5. Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah kepada Kabupaten Klaten sebagai Juara II Pemenang Pameran Produk Unggulan dan Potensi Daerah Jawa Tengah Tahun 2017 Kategori Tenun;
6. Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah kepada Umbul Pongok Kabupaten Klaten sebagai Peringkat IV Kategori Daya Tarik Wisata dikelola LSM/Kelompok Masyarakat/Perorangan;
7. Duta Wisata Indonesia pada Acara Pemilihan Duta Wisata Indonesia Tingkat Nasional ke-XII Tahun 2017.



Penas XV 2017  
Aceh



KEMENTERIAN PERTANIAN

# SERTIFIKAT

## PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

**DINAS PETERNAKAN KABUPATEN KLATEN,  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Sebagai Kabupaten Pelaksana Program  
Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)  
Berprestasi**



*"Melalui PENAS Petani Nelayan XV 2017  
Kita Mantapkan Kelembagaan Tani Nelayan dan Petani Hutan  
Sebagai Pilar Kerja Pemerintah dalam Rangka Kemandirian,  
Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Menuju Kesejahteraan  
Petani Nelayan Indonesia"*

Banda Aceh, 7 Mei 2017  
Direktur Jenderal Prasarana  
dan Sarana Pertanian/  
Pengarah Penas,

*Pending Dadih Permana*  
Aceh



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 045 / 0561

Diberikan kepada:

**TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN KLATEN**

Sebagai :

**JUARA HARAPAN II**

Dalam Pelaksanaan Lomba Cipta Menu Pangan Olahan Berbahan Baku Lokal  
Tahun 2017 yang diselenggarakan di Semarang pada tanggal 16 Mei 2017.

Semarang, 16 Mei 2017  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. SURYO BANENDRO, MP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610408 198903 1 006



**PENGHARGAAN**  
**KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2017**

Kepada

*Pemerintah Kabupaten Ksaten*

Kategori

**MADYA**

Pekanbaru, 22 Juli 2017

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia

Yohana S. Yembise



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor : 002.5/0012435

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 510/56 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pemberian Penghargaan Eksporir Tangguh Jawa Tengah Tahun 2017.

Diberikan kepada :

**PT. MONDRIAN**

Jl. KH. Hasyim Ashari no. 171 Kabupaten Klaten

Sebagai :

**Juara I**

**Kategori Perusahaan Kecil Menengah**


**EKSPORTIR TANGGUH JAWA TENGAH TAHUN 2017**



Semarang, 14 Agustus 2017.

GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, MIP



# YAYASAN DUTA WISATA INDONESIA

Pemegang Hak Paten Penyelenggaraan Pemilihan Duta Wisata Indonesia Tingkat Nasional  
Terdaftar Di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomer : JOO 2006 011 081

Memberikan Apresiasi Kepada :

INDIRA SALSABILLA AYU WIBOWO

Sebagai

**DUTA WISATA INDONESIA**

**TAHUN 2017**

**PEMILIHAN DUTA WISATA INDONESIA TINGKAT NASIONAL  
KE - XII TAHUN 2017 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


**Kenali Negerimu Cintai Negerimu**

Nusa Tenggara Timur, 2 Desember 2017

PANITIA

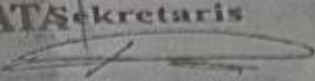
PEMILIHAN DUTA WISATA INDONESIA  
KE - XII TAHUN 2017

Ketua Panitia


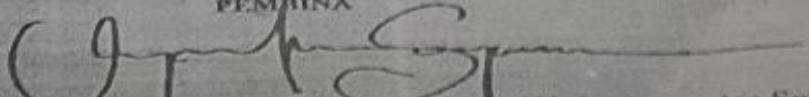
  
Nesya Santini, SE

**YAYASAN DUTA WISATA INDONESIA**

Sekretaris

  
Ricky, SH

MENGETAHUI  
PEMBINA

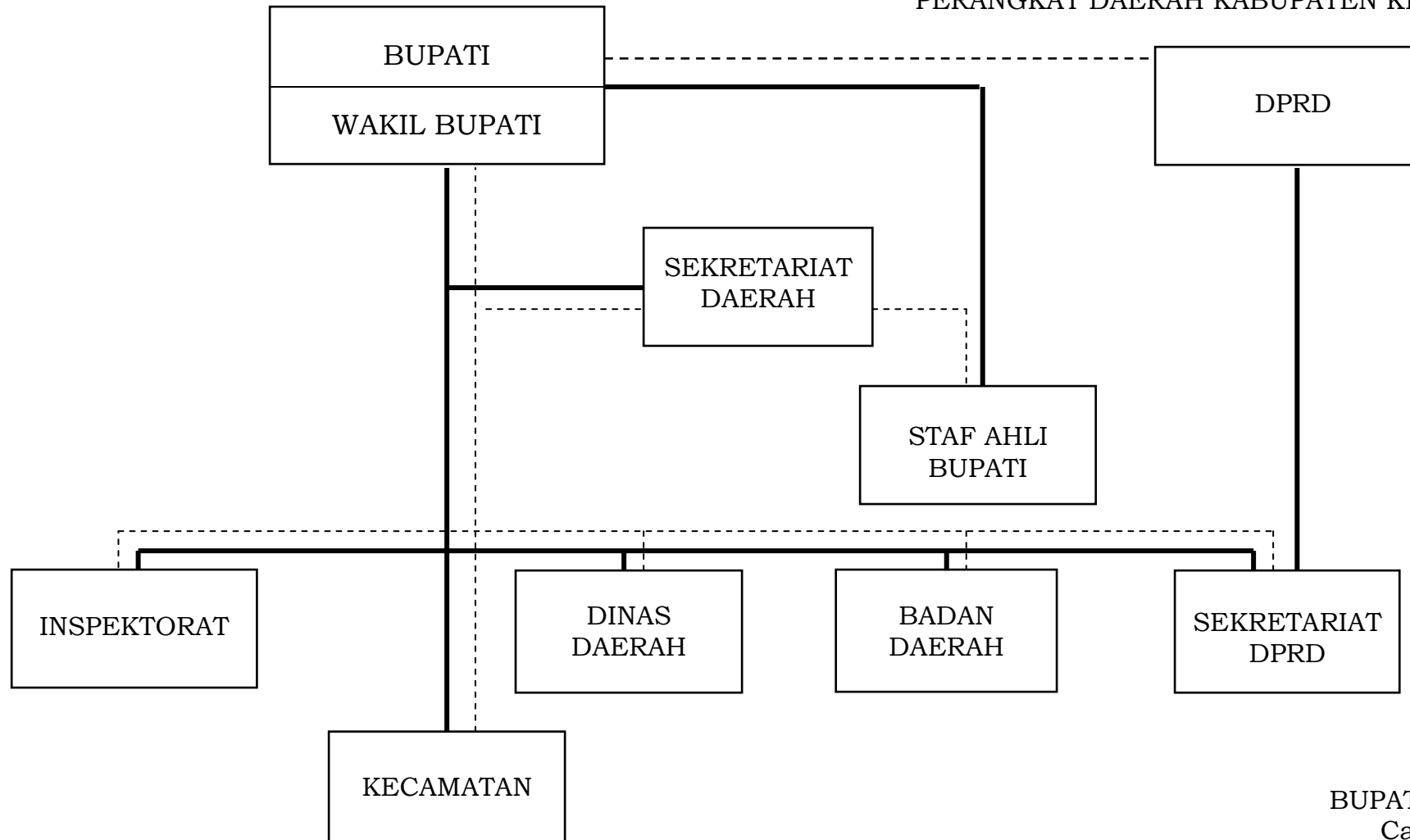
  
  
Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III  
Komite III Bidang Pariwisata

# LAMPIRAN I

## Struktur Pemerintah

### Kabupaten Klaten

PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR 36 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN



**Keterangan**

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI KLATEN,  
 Cap  
 ttd

SRI HARTINI





**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017  
KABUPATEN KLATEN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparatur, serta akuntabilitas instansi pemerintah	1.1 Angka Partisipasi Kasar PAUD	92,39
		1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	95,03
		1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	88,08
		1.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	82,10
		1.5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	63,94
		1.6 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	96,65
		1.7 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02
		1.8 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,10
		1.9 Angka kelulusan SD/MI	97,79
		1.10 Angka kelulusan SMP/ MTs	95,56
		1.11 Persentase kenaikan kunjungan perpustakaan	6,75
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	2.1 Persentase balita gizi buruk	0,74
		2.2 Angka kematian ibu melahirkan	14
		2.3 Angka kematian bayi	12
		2.4 Angka kematian balita	15,8
3	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya	3.1 Persentase kenaikan peserta festival seni dan budaya	55
		3.2 Persentase kenaikan kunjungan taman budaya	5
4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	4.1 Tingkat prestasi pemuda	47
		4.2 Tingkat prestasi olahraga	36
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	5.1 Persentase konsistensi perencanaan	74
		5.2 Persentase penggunaan data statistik	92
		5.3 Persentase pengelolaan arsip secara baku	3,61
		5.4 Persentase Sistem berbasis informasi	15
		5.5 Persentase pengamanan informasi persandian	62
		5.6 Skor LPPD	2,73
		5.7 Indeks profesionalitas ASN	83
		5.8 Skor LKJIP	62
		5.9 Opini Kemenkeu terhadap kapasitas fiskal daerah	0,21-0,3
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	6.1 Opini BPK terhadap LKPD	WTP
		6.2 Tingkat Muturitas SPIP	2
		6.3 Tingkat Kapabilitas APIP	2
7	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan	7.1 Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	11,76
		7.2 indeks kecukupan pangan	91,45
		7.3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,75
		7.4 Tingkat Konsumsi Ikan	16,94
		7.5 Persentase Kerusakan Hutan dan Lahan Kritis	16,42
8	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM dan	8.1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	34,76
		8.2 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	18,86

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
	penanaman modal	8.3	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	10
		8.4	Persentase kenaikan koperasi aktif	0,3
		8.5	Persentase kenaikan nilai investasi (%)	
			PMDN	1,81
			PMA	2,4
9	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan data saing sektor kepariwisataan	9.1	persentase kenaikan kunjungan wisatawan	3
10	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan data saing sektor ketenagakerjaan	10.1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	25,55
		10.2	Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani	81
11	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pengembangan ekonomi	11.1	Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan	5,00
12	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	12.1	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	56,92
		12.2	Persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	61,75
		12.3	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	61,82
		12.4	Persentase irigasi dalam kondisi baik (%)	19,122
		12.5	Rasio tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,066
		12.6	persentase pengoperasian TPA (%)	26
		12.7	Tingkat keselamatan lalu lintas	90
13	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan pemukiman	13.1	Persentase air minum layak	90,4
		13.2	Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak	93,00
		13.3	rasio luasan kawasan kumuh perkotaan	52,00
		13.4	Rasio cakupan elektrifikasi	96,00
		13.5	Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan	9,25
		13.6	Persentase penanganan RTLH	12,57
14	Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup	14.1	Status udara	29
		14.2	Status air	39
		14.3	Lahan tutupan	29
15	Terwujudnya pengukuran kerentanan resiko bencana	15.1	Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa)	1
16	Terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian ruang	12.1	Persentase kesesuaian pemanfatan ruang	91
17	Meningkatnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat	17.1	Angka kriminalitas	2,82
		17.2	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial	42,78
18	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah	18.1	Persentase penegakan peraturan daerah	91,25
		18.2	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	401

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
19	Meningkatnya kerukunan intern dan antar umat beragama	19.1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	29,6
		19.2 Persentase peningkatan penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama	75
20	Peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan	20.1 Rasio Perempuan Korban Kekerasan	1,5
		20.2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	53,96
		20.3 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	77,5
		20.4 Drop out akseptor KB	17
		20.5 Laju Pertumbuhan Penduduk	1,05
21	Peningkatan pemenuhan hak anak	21.1 Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	4,7
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	22.1 Persentase alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian	0,165
		22.2 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	91
		22.3 Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk	28,56
		22.4 Persentase peningkatan minat transmigrasi	35

Klaten, Januari 2017

Bupati Klaten





## BUPATI KLATEN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI MULYANI

Jabatan : BUPATI KLATEN

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Klaten, 9 Januari 2017



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
KABUPATEN KLATEN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	1.1 Angka Partisipasi Kasar PAUD	92,39	
		1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	95,03	
		1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	88,08	
		1.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	82,1	
		1.5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	64,44	
		1.6 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	96,65	
		1.7 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02	
		1.8 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,1	
		1.9 Angka kelulusan SD/MI	97,79	
		1.10 Angka kelulusan SMP/ MTs	95,56	
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	2.1 Persentase balita gizi buruk	0,74	
		2.2 Angka kematian ibu melahirkan	14	
		2.3 Angka kematian bayi	12,5	
		2.4 Angka kematian balita	15,9	
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	3.1 Persentase konsistensi	74	
		3.2 Persentase penggunaan data statistik	92	
		3.3 Skor LPPD	2,73	
		3.4 Indeks profesionalitas ASN	83	
		3.5 Skor LKJIP	62	
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	4.1 Opini BPK terhadap LKPD	WTP	
		4.2 Tingkat Muturitas SPIP	2	
		4.3 Tingkat Kapabilitas APIP	2	
5	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan	5.1 Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	11,76	
		5.2 indeks kecukupan pangan	91,45	
		5.3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,75	
6	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UMKM dan penanaman modal	6.1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	34,76	
		6.2 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	18,86	
		6.3 Persentase UMKM yang memiliki daya saing	10	
		6.4 Persentase kenaikan koperasi aktif	0,3	
		6.5 Persentase kenaikan nilai investasi (%)	PMDN	1,81
			PMA	2,4
7	Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan	7.1 Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	25,55	
		7.2 Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan tertangani	81	
8	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pengembangan ekonomi	8.1 Persentase hasil inovasi masyarakat/ hasil krenova/ TTG yang dikembangkan	5,00	
9	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	9.1 Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	56,92	
		9.2 Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	61,82	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
		9.3	Persentase irigasi dalam kondisi baik (%)	19
10	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan pemukiman	10.1	Persentase air minum layak	90,4
		10.2	Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak	93
		10.3	rasio luasan kawasan kumuh perkotaan	52,00
		10.4	Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan	9,25
		10.5	Persentase penanganan RTLH	12,57
11	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	11.1	Persentase kenaikan desa tangguh bencana (desa)	1
12	Terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian ruang	12.1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	91
13	Meningkatnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat	13.1	Angka kriminalitas	2,82
		13.2	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial	42,78
14	Peningkatan pemenuhan hak anak	14.1	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	4,7
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	15.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	91
		15.2	Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk	28,56

No	Program	Anggaran (Rp)
I	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar bagi masyarakat	
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.582.800.000
2	Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	29.136.640.000
4	Pendidikan Non Formal	1.235.950.000
5	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.771.800.000
6	Manajemen Pelayanan Pendidikan	891.000.000
II	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan	
1	Upaya Kesehatan Masyarakat	2.112.884.900
2	Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.369.285.000
3	Pengawasan Obat dan Makanan	52.000.000
4	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	83.720.000
5	Perbaikan Gizi Masyarakat	61.500.000
6	Pengembangan Lingkungan Sehat	1.173.836.000
7	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	430.000.000
8	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	4.200.000.000
9	Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin	9.114.222.000
10	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	16.471.016.000
11	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	2.200.000.000
12	Peningkatan Pelayanan kesehatan lansia	80.226.000
13	Manajemen informasi dan regulasi kesehatan	165.000.000
III	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	
1	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan	150.000.000
2	Perencanaan pembangunan daerah	1.680.000.000
3	Perencanaan pembangunan Ekonomi	560.000.000
4	Perencanaan Bidang Sosial Budaya	730.000.000
5	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	408.850.000
6	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	659.770.000
7	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	50.000.000
8	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	954.900.000
9	Pengembangan komunikasi, informasi dan Media Massa	676.273.000
10	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	10.000.000
11	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	1.708.191.000
12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	28.124.449.150
13	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	571.918.000
14	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.858.750.000
15	Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah	172.371.000
IV	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	
1	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	19.941.300.000
2	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah	570.000.000
3	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1.831.305.200
4	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	3.479.745.000
5	Peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa	172.000.000
6	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	40.000.000
7	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa/Kelurahan	1.292.000.000
8	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	486.000.000
9	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	13.350.000
10	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	339.104.000
11	Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	31.100.000



No	Program	Anggaran (Rp)
12	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	8.663.630.000
V	Peningkatan dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan	
1	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	100.000.000
2	Prevensi dan penanggulangan penyakit ternak	50.000.000
3	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	45.000.000
4	Peningkatan produksi hasil peternakan	235.000.000
5	Peningkatan kesejahteraan petani	845.910.000
6	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	668.000.000
7	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.432.500.000
8	Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	115.000.000
9	Rehabilitasi hutan dan lahan	3.096.084.000
VI	Peningkatan dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor Indagkop, UMKM dan PM	
1	Pengembangan industri kecil dan menengah	1.570.166.000
2	Peningkatan kemampuan teknologi industri	75.000.000
3	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	200.000.000
4	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	6.060.000.000
5	Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	50.000.000
6	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	200.000.000
7	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	375.000.000
8	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	75.000.000
9	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	5.000.000
10	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	116.675.000
11	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	274.805.000
VII	Peningkatan dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan	
1	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	835.000.000
2	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	186.000.000
VIII	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pengembangan ekonomi	
1	Pendataan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan	400.000.000
IX	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	
1	Pembangunan jalan dan jembatan	56.394.080.000
2	Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	50.000.000
3	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/perkotaan	935.000.000
4	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	23.506.094.300
5	Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	4.250.000.000
6	Pengendalian Banjir	200.000.000
7	Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan	17.033.264.600
8	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	160.000.000
9	Penataan Trotoar	600.000.000
10	Peningkatan Pelayanan Angkutan	319.000.000
11	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	180.000.000
12	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	440.000.000
13	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	50.000.000
14	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	285.000.000
15	Pengembangan Perumahan	300.000.000
16	Pembinaan dan pengawasan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	335.000.000
17	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.223.989.000
18	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	390.000.000
X	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana, utilitas kawasan perumahan dan permukiman	

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	7.865.180.700
2	Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	2.800.000.000
3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.455.000.000
XI	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	
1	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	175.000.000
2	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100.000.000
3	Peningkatan Pengelolaan logistik	375.000.000
4	Penanganan Darurat Bencana	618.600.000
XII	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	
1	Perencanaan Tata Ruang	300.000.000
2	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	525.000.000
XIII	Meningkatnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat	
1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	370.000.000
2	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	380.000.000
3	Peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik	190.500.000
4	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	200.000.000
5	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	123.000.000
6	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	58.000.000
7	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	475.075.000
8	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	609.515.000
XIV	Peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	
1	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.000.000
XV	Terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	
1	Penataan penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah	15.000.000
2	Penataan Administrasi Kependudukan	1.035.000.000
	Jumlah	296.642.324.850

Klaten, 9 Januari 2017  
 Bupati Klaten,  
  
 Hj. SRI MULYANI

